



#6

Merefleksikan Makna Pendataan dari Kampung Padat Penduduk: Regsosek di Surakarta

Nuzul Solekhah & Rachmini Saparita

A. Mempertanyakan Bantuan Sosial: Pengantar

“*La endi bantuane, didata bola bali ki endi bantuane,*” celetukan bapak-bapak sambil menyeruput kopi hitam di warung kopi di samping pemakaman tua Kampung Semanggi. Kalimat ini jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti “Mana sih bantuannya, sudah didata berkali-kali, mana bantuannya?” Pertanyaan ini menjadi salah satu topik pembahasan dalam tulisan ini. Perbincangan pembuka di ruang kepala di lantai dua Kantor BPS Kota Surakarta (Solo), berlangsung hangat membahas pengendalian inflasi skala lokal tingkat kota karena prediksi arus keluar masuk aktivitas manusia di kota tersebut.

Pelbagai agenda yang menyedot arus pariwisata di Solo Raya menempatkan Kota terpadat di Jawa Tengah itu menjadi pilihan untuk menginap. Peristiwa ini menunjukkan efek berantai dari urbanisasi

N. Solekhah,* & R. Saparita

*Badan Riset dan Inovasi Nasional, Jakarta, *e-mail*: nuzu001@brin.go.id

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Solekhah, N., & Saparita, R. (2023). Merefleksikan makna pendataan dari Kampung Padat Penduduk: Regsosek di Surakarta. Dalam Humaedi, M. A., Imron, D. K. & Pramono, A. (Ed.), *Mencatat untuk Membangun Negeri Narasi Emik Registrasi Sosial Ekonomi Seri 2: Indonesia Tengah-Barat* (167–226). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.777.c708 ISBN: 978-623-8052-95-0 E-ISBN: 978-623-8052-99-8

sekaligus *urban sprawl* di Solo Raya. Bagaimana magnet aktivitas pembangunan di pinggiran kota berdampak terhadap kebutuhan masyarakat di pusat kota, dan sebaliknya. Bagaimana pekerjaan di pusat kota menjadi daya tarik bagi pekerja dari pinggiran kota. “Ini sebentar lagi hotel di sini penuh saat milad Muhammadiyah pertengahan November nanti bu, efeknya akan terjadi inflasi di tingkat lokal karena mereka pasti akan kuliner, segala macam, harga akan naik, tapi masih terkendali lah,” ucap Pak Totok Tavirijanto, Kepala BPS Kota Surakarta.

Masalah utama yang dihadapi Kota Surakarta terkait erat pada isu mengenai kependudukan dan pencatatan administrasi. Masalah sosial semakin kompleks ketika pertumbuhan penduduk semakin tinggi (Ricklefs, 2008). Bruce Curtis, Sosiolog Antropolog mensarikan perspektif Michel Foucault terkait penemuan istilah populasi menjadi titik balik yang cukup signifikan dalam proses transformasi suatu negara. Menurut Foucault, populasi adalah poros yang mengubah transisi dari “kebijakan berbasis otoritas berdaulat” ke dalam “kebijakan yang berbasis pemerintahan” dengan konsekuensi mendesentralisasikan negara di bawah liberalisme (Curtis, 2016).

Dua revolusi besar pada pengaruh penggunaan teknologi dalam kekuasaan sejak zaman klasik ialah perkembangan anatomi teknik politik yang ditujukan untuk tubuh individu dan pengembangan teknik bio-politik yang ditujukan untuk tubuh kolektif atau sosial. Keduanya tidak akan dapat terealisasi tanpa intervensi perhatian terhadap populasi (Curtis, 2016). Lebih lanjut, Foucault menggunakan populasi untuk menelisik tentang kepadatan penduduk (*populousness*) dan tubuh sosial (*social body*). Tubuh sosial merujuk pada kategori organik dan atomik yang dilekatkan pada individu-individu tertentu. Merujuk istilah pendataan yang dilakukan BPS, satuan lingkungan setempat (SLS) adalah suatu wilayah kolektif yang kondisi sosial ekonomi anggotanya tidak merata (BPS, 2020). Ketidaksetaraan kelas dan kondisi tersebut sangat bergantung pada keterjalinan relasi yang terbentuk di dalamnya. Konsep kepadatan penduduk memungkinkan untuk perencanaan kebijakan yang dapat digunakan

pada masa mendatang, yang mana menurut doktrin merkantilisme, derajat kepadatan penduduk dianggap sebagai indeks kesejahteraan dan ukuran kebijakan.

Terdapat tiga metode yang lazim digunakan dalam pengumpulan data kependudukan di Indonesia, yaitu survei, registrasi, dan sensus (Tukiran, 2016). Pengumpulan data yang hanya dilakukan pada sebagian dari penduduk yang ada pada suatu waktu dan daerah tertentu biasa disebut sebagai survei. Pengumpulan data yang dilakukan terus menerus dari waktu ke waktu untuk penduduk yang ada adalah registrasi. Adapun sensus adalah proses pencacahan secara menyeluruh terhadap penduduk yang ada pada suatu daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Ada dua periode pelaksanaan sensus di Indonesia, yaitu sebelum kemerdekaan (1815–1945) dan setelah kemerdekaan (1961–2000) (Tukiran, 2016). Seiring berjalannya waktu, kebutuhan data terpadu di Indonesia diperlukan untuk memangkas anggaran pendataan yang berpotensi diklaim antar instansi/lembaga dengan kepentingan masing-masing. Tahun 2022 adalah tahun awal pelaksanaan registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang dilakukan dengan harapan tidak hanya menjadi acuan data dalam alokasi perlindungan sosial, tetapi juga digunakan oleh berbagai instansi (pusat-daerah) melalui strategi perencanaan yang lebih komprehensif. Pada Tabel 6.1 terlihat dinamika sensus di Indonesia dari periode sebelum merdeka dan setelah merdeka (Tukiran, 2016).

Tabel 6.1 Dinamika Sensus Penduduk di Indonesia

Periode waktu	Tahun Sensus	Keterangan
Sebelum merdeka	1815–1930	Selama 115 tahun dilakukan sepuluh kali sensus dan hanya sensus tahun 1905, 1920, dan 1930 yang dikategorikan memiliki data baik. Data sensus tahun 1930 adalah rujukan data yang banyak digunakan untuk analisis kependudukan pada tahun selanjutnya
	1942–1945	Sensus di tingkat lokal, namun semua data dokumen hasil sensus dinyatakan hilang, kecuali untuk Provinsi Kalimantan Barat dan Pulau Lombok

Periode waktu	Tahun Sensus	Keterangan
Setelah Merdeka	1961, 1971, 1980, 1990, 2000	<ul style="list-style-type: none"> • Provinsi Irian Jaya belum termasuk dalam SP 1960 sehingga belum mencakup seluruh wilayah di Indonesia • Sebagian wilayah Irian Jaya kota dan beberapa pulau terasing mulai didata pada tahun 1971 • Provinsi Timor Timur belum didata karena belum bergabung dengan Indonesia • Pencacahan 1980 mencakup wilayah lebih luas dengan ketercakupannya Provinsi Irian Jaya baik area perkotaan maupun pedesaan • SP 1990 mencakup area terlengkap karena menjangkau daerah terpencil, suku terasing dan pulau kecil, dan wilayah Timur • SP 2000, Timor Timur terpisah dengan Indonesia, dan masalah pengungsian menjadi problem bersama • Sensus 2020 tetap berjalan, tetapi terkendala pandemi

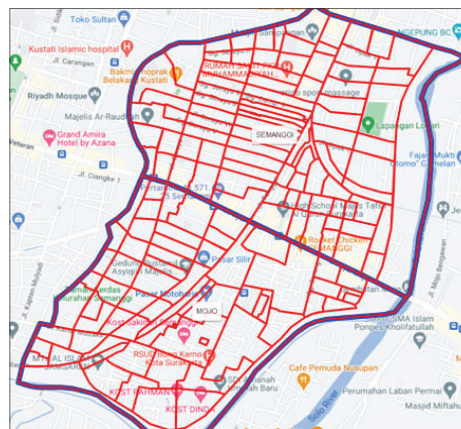
Sumber: Diolah kembali dari Tukiran (2016)

Pada tahun 1971, data penduduk tingkat desa masih belum tersedia karena terjadi realokasi desa di seluruh kecamatan. Kecamatan yang terkena dampak, digabungkan untuk tujuan komputasi jumlah populasi sedemikian rupa sehingga semua realokasi desa terjadi dalam batas unit gabungan yang lebih besar (Chandra, 2019). Pada dasarnya, terdapat tiga jenis sensus yang dilakukan di Indonesia, yaitu sensus pertanian yang dilakukan setiap tahun yang berakhiran dengan angka 3, sensus ekonomi yang dilakukan setiap tahun yang berakhiran angka 6, dan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun berakhiran angka 0. Proses pendataan penduduk memiliki peran yang sangat penting bagi perencanaan kebijakan, sekaligus sebagai dasar perancangan sistem penyaluran perlindungan sosial agar tidak salah sasaran. Adanya proses pendataan yang masih tumpang tindih dilakukan oleh *stakeholders*, baik pusat maupun daerah menjadi salah satu latar belakang urgensi satu data terpadu terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat. Tahun ini menjadi tahun pertama penyelenggaraan

Regsosek di Indonesia. Proses pendataan Regsosek menasar sampai unit rumah tangga yang ditandai oleh titik di setiap rumah terdata melalui *Global Positioning System* (GPS). Perkembangan teknologi dan komunikasi turut mempengaruhi dinamika pendataan di Indonesia sehingga data yang terekam dapat lebih akurat.

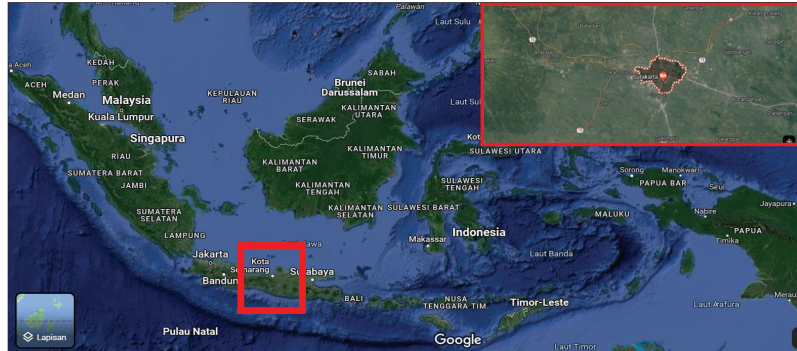
B. Solo yang Terjepit: Otentisitas Bentang Alam

Target lokasi yang menarik dalam kajian ini diarahkan pada daerah dengan konsentrasi kepadatan penduduk, pendatang, dan menghadapi tantangan multidimensi. Berdasarkan data kepadatan penduduk di Kota Surakarta, Kelurahan Semanggi adalah lokus yang sesuai. Kampung Semanggi menempati posisi kedua terpadat setelah Sangkrah dan representatif terhadap permasalahan multidimensi. Wilayah yang memiliki penduduk sebesar hampir 24 ribu jiwa (BPS Kota Surakarta, 2021) tersebut, pada awalnya adalah wilayah kumuh yang berdekatan dengan Bengawan Solo. Perubahan kondisi wilayah tentunya menyebabkan dinamika pada kehidupan masyarakat. Berbagai pembenahan dan relokasi Kampung Semangging (Gambar



Sumber: BPS Surakarta (2023)

Gambar 6.1 Peta Kelurahan Semanggi dan Mojo, Surakarta



Sumber: Google (t.t.)

Gambar 6.2 Peta Kota Surakarta

6.1) menjadi pilihan yang patut untuk dikaji secara mendalam, terkhusus pada ruang sosial yaitu relasi sosial yang dibangun di atas struktur ruang yang senantiasa mengalami ketegangan.

Kota Surakarta diapit oleh Kabupaten Boyolali, Karanganyar, dan Sukoharjo. Kota Surakarta sebagai kota utama di Solo Raya menjadi magnet bagi para pendatang dari pinggiran Kota Surakarta (Solo). Para pendatang menyebabkan proses perebutan ruang yang oleh McKenzie diistilahkan sebagai invasi atas ruang (McKenzie, 1924). Perebutan ruang di pinggiran perkotaan terjadi sebagai imbas dari perebutan alat-alat produksi. Meskipun urbanisasi di kota di Asia Tenggara tidak serta merta disebabkan oleh industrialisasi semata, tetapi lebih pada ketidakcukupan struktur ekonomi dan sosial kota (Ever & Korff, 2002). Berbagai argumen tersebut tampaknya tergambarkan dari situasi di Kelurahan Semanggi, tepatnya di RT 3 RW 3. Warga paruh baya yang bekerja di ranah informal, seperti buruh bangunan, sopir becak, dan sopir angkot berkumpul di satu warung yang lokasinya berdekatan dengan makam. Warga yang tidak mendapatkan tempat duduk akan duduk di atas kijing makam yang berada satu tenda dengan warung. Pemandangan ini merupakan peristiwa yang lumrah bagi warga. Sejarawan perkotaan, Purnawan Basundoro dalam bukunya

mengungkap bahwa saat masyarakat miskin kota tidak mampu mengalahkan manusia yang hidup, maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan ruang layak adalah mencoba mengalahkan manusia yang telah mati, yang tidak mungkin memberikan perlawanan jika dipikir secara logika (Basundoro, 2022).

Keberadaan Kota Surakarta sebagai tanah kelahiran Presiden Joko Widodo rupanya memberi nilai tawar kepada para penghuni kampung di pinggiran kota. Kontestasi politik mempengaruhi proses pembenahan yang kemudian harus dibayar oleh aktor politik jika ingin memenangkan wilayah tersebut. Para penghuni Kampung (Kelurahan) Semanggi mendapatkan angin segar dengan proyek pembangunan fisik yang dengan mulus dapat cepat. Ketua RW Kampung Harmoni membenarkan alasan dibalik kesediaan masyarakat untuk tetap kompak dan bersatu padu melaksanakan relokasi. Nur Rachmad sebagai ketua RW mengatakan, “Kerukunan mbak, kalau semua orang di sini 100 nggak punya semua itu rukun, tapi kalau dari 100 itu yang 20 punya tapi 80 nggak punya wah itu jadi rame.” Jawaban Nur Rachmad menggambarkan bagaimana pola relasi di atas kawasan relokasi dapat terbangun. Solidaritas masyarakat terbangun atas kesamaan nasib dan ketidakpastian.

Masyarakat menerima untuk menunggu selesainya proses pembangunan rumah relokasi. Masyarakat mengorganisir diri untuk mencari lokasi tinggal sementara sesuai dengan preferensi informasi dan biaya yang dimiliki. Ada sebagian warga yang mengontrak di dekat lokasi asal, ada sebagian lagi menumpang di rumah saudara ketika proses pendataan Regsosek berlangsung. Koordinasi antara petugas pendata dengan ketua RT dan RW menjadi penentu yang sangat penting karena ketua RT dan ketua RW yang akan menunjukkan dimana lokasi kepindahan penghuni rumah di bantaran sungai.

Berdasarkan penelusuran literatur, Kota Surakarta merupakan kota rawan banjir (Setyaningrum dkk. 2017; Padawangi, 2019). Namun, semenjak pembangunan parapet di tanggul Bengawan Solo, bencana hidrometeorologi sudah jarang masuk ke pemukiman

warga. Hal ini pun dibenarkan oleh Asisten Manajer dan Wartawan Tribunnews.

“Jadi, saya itu tugas di Solo 2010 masih pak Jokowi, periode kedua, di Solo memang dulu jadi kawasan banjir, terutama pinggiran Bengawan, Jebres, Pasar Kliwon, sama satunya, Laweyan, yang paling parah itu Jebres sama Pasar Kliwon. Dari dulu memang jadi kawasan yg dibilang kumuh. Jadi, kalau masuk kampung jangan heran kalau baunya menyengat. Kaya tengkletek, kaya di labirin di Jakarta, banyak langganan banjir. Dulu kalau banjir rumah-rumah hanya tinggal atap permukiman pucang sawit, dulu sangat mengerikan banjir setiap. Dulu ketika banjir wartawan selalu punya catatan, pagi ini hujan sampai malam, nanti aku mau liput kemana, pasti nanti warga tidur di emperan bantaran. Banjir selutut ya selutut yang kami tulis. (Asep, Tribunnews, Wawancara 2 November 2022)

Program pembangunan fisik perlahan-lahan mulai nampak hasilnya. Mampukah program yang dibangun di ruang fisik tersebut merubah ruang sosial yang tercipta di atasnya? Fakta di lapangan menggambarkan bahwa warga sadar atas stigma yang dilekatkan kepada masyarakat Kampung Semanggi. Relokasi yang menghadiahkan bangunan fisik berupa rumah membawa warga Kampung Semanggi dan Kampung Harmoni pada tahapan equilibrium. Warga Kampung Semanggi dan Kampung Harmoni merasa setara dengan warga yang lain dengan adanya kepemilikan rumah dan tanah sebagai tolak ukurnya. Ketika dilakukan pendataan Regsosek, warga antusias dengan menyebutkan kepemilikan dokumen administrasi, kemudahan akses pada pelbagai fasilitas kesehatan, kependudukan, pendidikan, dan lain-lain. Warga juga menyebutkan lembaga sosial yang ada di lingkungannya, mulai dari PKK, Posyandu Lansia, Kelompok Ilmiah Remaja, dan sebagainya. Pernyataan warga menggambarkan bagaimana kepercayaan diri dalam bersosialisasi meningkat seiring dengan perbaikan kondisi kehidupan masyarakat. Rupanya, ruang

fisik mempengaruhi aktivitas sosial di atasnya sehingga tercipta pola relasi baru seiring dengan pembenahan struktur ruang yang sedang dilakukan.

Kesulitan pendataan justru dialami petugas ketika mendata rumah warga dengan kelas sosial ekonomi menengah ke atas. Salah satunya, wilayah yang penghuninya adalah keturunan pendatang, tetapi sudah lama berada di wilayah Baluwarti. Kriteria bangunan dengan tembok dan pagar yang tinggi rupanya mempengaruhi kontak sosial dengan lingkungan di sekitarnya. Hal ini juga menyulitkan petugas pendata karena membutuhkan waktu lama untuk sekedar permissi dan menyampaikan maksud pendataan. Dari perspektif sosiokultural, Baluwarti adalah kelurahan dengan tingkat kesulitan pendataan yang bertingkat. Pada akhirnya, beberapa petugas terpaksa mengajak ketua RT/RW setempat untuk mendatangi rumah-rumah yang sulit diakses. Selain masyarakat kelas menengah ke atas, rupanya pendataan di kawasan Keraton Surakarta juga membutuhkan strategi khusus. Adanya peraturan adat bahwa keluarga kerajaan yang sudah menikah diharuskan keluar dari lingkungan keraton menyebabkan persebaran keluarga kerajaan tidak hanya di luar Baluwarti, tetapi juga sampai luar wilayah Solo dengan kepemilikan KTP Solo.

Selain proses pendataan warga di pemukiman, pada tanggal 29 Oktober 2022 secara serentak di Indonesia dilakukan malam Regsosek, yaitu pendataan terhadap tunawisma dan warga yang tidak memiliki hunian tetap. Responden yang diwawancarai sebagian berada di atas becak, trotoar, depan toko, dan disanalah mereka tinggal. Responden juga ada yang tidak dapat berkomunikasi dengan baik, sebagian dari mereka ada yang terganggu pendengarannya, memiliki gangguan mental, pikun, dan beberapa kondisi lainnya. Beberapa responden bahkan ada yang tidak memiliki kartu identitas. Kepala BPS Kota Surakarta memberikan surat tugas dengan catatan bahwa semua petugas pendataan dilarang menggunakan baju dinas agar mereka tidak merasa terganggu. Terakhir, mekanisme *tagging* dilakukan di lokasi tempat dimana mereka tidur.

C. Menelisik Pemahaman Alur Bisnis Regsosek

Suatu obrolan menyelingi suasana perjalanan menuju kantor BPS Kota Surakarta. Menurut salah satu statistisi BPS RI, Agus Pramono mengistilahkan “keranjang” sebagai kategorisasi terhadap sekian persen masyarakat yang memerlukan intervensi dari pemerintah. Pendataan sosial ekonomi pada ujungnya memang akan digunakan sebagai penunjuk arah kepada siapa intervensi pemerintah akan dilakukan. Selama ini, penerima bantuan sosial adalah masyarakat yang termasuk kategori 40% penduduk miskin. Namun, pada kenyataannya kondisi sosial ekonomi masyarakat mengalami dinamika sangat intens.

Pada umumnya, para pihak berpikir bahwa masyarakat miskin ialah kelompok yang memerlukan intervensi program pemerintah. Namun, realitanya masyarakat yang terkena bencana alam maupun sosial juga berpotensi kehilangan aset yang mereka miliki. Selain itu, angkatan kerja yang memerlukan pekerjaan maupun suntikan dana usaha belum tentu berasal dari kalangan miskin, tetapi dari segi analisis kelayakan mereka berhak mendapatkan intervensi tersebut. Oleh karena itu, “keranjang” yang tadinya digunakan sebagai acuan penyaluran bantuan tersebut perlu diperbarui. Salah satu upaya BPS sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pendataan adalah melalui kegiatan Regsosek. “Pemerintah butuh data yang komprehensif, bukan hanya data 40% terbawah, tetapi 100% data dari warga. Nah, makanya Regsosek ini didesain untuk memenuhi kebutuhan itu,” ungkap Bapak Agus Pramono.

Selanjutnya, hal menarik dari proses pendataan Regsosek ini adalah adanya keterlibatan komunitas dalam proses pendataan. Artinya, data yang terekam bukan murni dari sudut pandang petugas lapangan, tetapi juga hasil diskusi dengan komunitas yang dalam hal ini dipahami sebagai lingkungan dimana warga yang terdata tinggal dan berdomisili. Komunitas tersebut mencakup ketua RT/RW dan tetangga yang mengetahui kondisi riil dari kondisi sosial ekonomi warga yang didata. Mekanisme ini dimaksudkan untuk mengonfirmasi kesesuaian data yang disampaikan oleh warga terdata

dengan kesaksian dan pendapat komunitas di sekitarnya. Bapak Agus Pramono mengemukakan, “Kalau dulu ada PPLS, 2011, kemudian PBDT tahun 2015, keduanya adalah untuk menjaring 40% terbawah tadi.”

Registrasi sosial ekonomi (Regsosek) merupakan pendataan kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan seluruh penduduk Indonesia. Data yang dikumpulkan menggunakan pendekatan keluarga, melalui kartu keluarga di tempat masyarakat tinggal/menetap. Informasi kondisi sosial ekonomi yang dikumpulkan, meliputi kondisi sosio-ekonomi demografis, kondisi perumahan dan sanitasi air bersih, kepemilikan aset, kondisi kerentanan kelompok penduduk khusus, informasi geospasial, tingkat kesejahteraan, dan informasi sosial ekonomi lainnya (BPS, 2022). Data Regsosek diharapkan dapat menjadi jembatan berbagai penggunaan data secara lintas lembaga/kementerian dan lintas daerah, hingga tingkat desa/kelurahan karena terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya. Berbagai media penyebaran dipergunakan BPS untuk sosialisasi kegiatan Regsosek. Gambar 6.3 memperlihatkan aneka bentuk *leaflet* sebagai media penyebaran informasi Regsosek.

Regsosek direncanakan akan diperbarui secara rutin dan dikelola di tingkat desa dan kelurahan. Dengan kapasitas dan tingkat akurasi yang baik, Regsosek mendukung upaya perencanaan, penganggaran, dan pengendalian yang berbasis bukti dan data sehingga dapat mendorong percepatan pencapaian berbagai target pembangunan. Cakupan informasi Regsosek mendukung proses perencanaan multisektor di bidang sosial, pemberdayaan ekonomi, infrastruktur, perumahan dan permukiman, pertanian, kesehatan, pendidikan, energi, serta penegakkan hukum dan hak asasi manusia (BPS, 2022).

Tahun 2022 merupakan tahapan pertama kegiatan Regsosek, yang terdiri dari tiga kegiatan, yaitu koordinasi dan konsolidasi teknis, penyiapan basis data, dan pengumpulan data. Sementara tahap kedua akan dilaksanakan pada tahun 2023, dengan kegiatan pengolahan data, analisis data, dan diseminasi (penyerahan data) masyarakat melalui pemerintah (BPS, 2022). Bagaimana masyarakat memahami



Sumber: BPS berbagai publikasi (2022)

Gambar 6.3 Berbagai informasi Regsosek yang tersebar di masyarakat

data terpadu yang ditawarkan dari Regsosek, dan pendataan apa saja yang kedepannya berpotensi tidak lagi dilaksanakan karena sudah dipangkas oleh Regsosek?

“Mungkin, ini saya bilang mungkin ya, karena kaitannya kan dengan kementerian masing-masing. Kemungkinan nanti pakai data ini, tinggal nanti Bappenas yang mengorganisir. Oh, kebutuhan ini pakai data ini, ini pakai ini, begitu,” pendapat Bapak Agus Pramono. Kegiatan Regsosek dipersiapkan dengan cukup singkat, yaitu mulai dari bulan Juli 2021. Koordinasi oleh BPS dengan berbagai pihak dilakukan selama dua bulan (Juli–Agustus 2022), seperti rapat koordinasi daerah, perekrutan pelaksana di lapangan, perekrutan Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), Petugas Pemeriksa Lapangan (PML), maupun Petugas Pendataan Lapangan (PPL).

Kegiatan selanjutnya ialah pelatihan instruktur dan petugas lapangan. Perekrutan dan pelatihan dilaksanakan pada bulan September–Oktober 2022. Pendataan di lapangan dilaksanakan pada periode satu bulan, mulai dari 15 Oktober–14 November 2022. Kemudian, ada pula malam Regsosek juga dilaksanakan di Kota Surakarta pada tanggal 29 Oktober 2022. Pendata didampingi BPS Kota Surakarta menjalankan tugas mulai dari pukul 10.00 malam



Keterangan: (a) petugas bersiap dari Kantor BPS Kota Surakarta; (b) mendata warga yang bertempat tinggal di becaknya; (c) mendata warga yang biasa tinggal di emperan toko.
Foto: BPS Kota Surakarta (2022)

Gambar 6.4 Malam Pendataan Regsosek 29 Oktober 2022 di Kota Surakarta

sampai pukul 03.00. Pemilihan waktu didasarkan pada kondisi para tunawisma akan berada di tempat mereka beristirahat (Gambar 6.4), baik yang beristirahat di becaknya maupun di emperan toko.

Moda pengumpulan data masih menggunakan kertas dan pensil dalam mewawancarai keluarga. Pengumpulan data dilengkapi dengan *geotag* dan foto keluarga miskin. Pendataan awal menggunakan pendekatan keluarga dengan memperhatikan domisili semua anggota keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga (KK). Pendataan lapangan pada tahap awal (2022) diawali dengan koordinasi dan konsolidasi teknis antar petugas lapangan, baik di tingkat kecamatan (Koseka), kelurahan (PML), dan lapangan (PPL). Permintaan izin ketua/pengurus satuan lingkungan setempat (SLS) dilakukan oleh petugas lapangan Regsosek. Disamping permintaan izin, petugas Regsosek dituntut mengenali wilayah kerja mereka. Para ketua/pengurus SLS melanjutkan tugasnya dengan mengidentifikasi status kesejahteraan keluarga secara subjektif. Penyiapan keperluan basis data dan kebutuhan teknis dilaksanakan terlebih dahulu dengan pencetakan instrumen, pengadaan serta perlengkapan pendataan.

Penilaian status kesejahteraan keluarga ini dilanjutkan secara objektif melalui wawancara langsung ke rumah tangga. PPL juga melakukan *geo-tagging* lokasi keluarga. Hasil kerja PPL diperiksa oleh PML. PML mengawasi kegiatan pendataan dan memeriksa kelengkapan dokumen yang telah diisi oleh PPL. Setiap PPL diberi tugas mengumpulkan data sekitar 250–400 keluarga, sementara setiap empat PPL dimonitor oleh satu PML. Koordinator (Koseka) mengawasi kegiatan pendataan dari PML dalam lingkup kecamatan dan menyerahkan hasil pendataan ke BPS kabupaten/kota di mana mereka bertugas.

Data yang dikumpulkan secara *door to door* (Gambar 6.5), meliputi data kependudukan dan ketenagakerjaan, perlindungan sosial, perumahan, pendidikan, kesehatan, disabilitas, dan pemberdayaan ekonomi. Data tersebut menjadi basis data kependudukan yang terupdate. Verifikasi daftar keluarga, baik keberadaannya maupun status kesejahteraan, dilakukan PML bersama ketua/pengurus SLS, setelah pendataan diselesaikan PPL. Pendataan lapangan dapat dimonitor oleh BPS melalui *dashboard monitoring*.



Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.5 PPL didampingi PML dan Peneliti BRIN saat mendata Regsosek secara *door to door*.

Data sosial ekonomi penduduk Indonesia perlu dikumpulkan secara valid agar pemerintah dapat merespon kebutuhan perlindungan sosial di masyarakat. Basis data sosial ekonomi penduduk bersumber langsung dari tingkat pemerintahan terendah, yaitu Rukun Tetangga (RT). Pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang tepat berbasis data yang akurat. Data akurat diperlukan untuk menetapkan kebijakan pembangunan yang tepat. Pengolahan data Regsosek direncanakan dilaksanakan pada tahun 2023. Bagi Pengolah data akan dilakukan *capacity building* pemeringkatan *proxy mean test* (PMT), yaitu untuk memperkirakan kondisi sosial ekonomi setiap rumah tangga dengan menggunakan data karakteristik rumah tangga, seperti jumlah anggota keluarga, status pendidikan, kondisi rumah, kepemilikan aset, dan lain-lain (BPS, 2022). Metode ini telah digunakan di banyak negara untuk pemeringkatan status kesejahteraan rumah tangga, termasuk oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) (TNP2K, 2022). Pelatihan pengolahan data pada pengolah data dilakukan pada tahun 2023.

Pengelolaan data hasil Regsosek dilakukan dengan prinsip integritas dan interoperabilitas sehingga hasilnya diharapkan dapat dimanfaatkan secara luas oleh para pengambil kebijakan (BPS, 2022). Hasil Regsosek akan menyajikan peringkat kesejahteraan setiap penduduk. Pelaksana Regsosek tergabung dalam gugus tugas pendataan yang berkoordinasi dengan penyelenggara satu data Indonesia. Kementerian/lembaga yang termasuk dalam gugus tugas adalah Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Komunikasi, dan Informatika, serta BPS (BPS, 2022).

D. Peran BPS Pusat dan Daerah dalam Regsosek

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Republik Indonesia, 1997), yang berperan sebagai penyedia

kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data didapatkan dari sensus atau survei yang dilakukan sendiri dan juga kementerian/ lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder.

Selaras dengan pidato Presiden Joko Widodo pada 16 Agustus 2022 (Kementerian PPN/Bappenas, 2022), Regsosek seluruh penduduk merupakan salah satu reformasi sistem perlindungan sosial melalui perbaikan basis data sosial ekonomi yang mengintegrasikan kebutuhan serta pemanfaatan bersama kementerian dan lembaga. Selain BPS RI, peran Kementerian PPN/Bappenas juga Kementerian Kominfo dalam Regsosek adalah mengorkestrasi seluruh data tanah air sampai ke daerah. Dengan pengalokasian fiskal sedemikian rupa untuk seluruh kementerian/lembaga maka Kementerian PPN/Bappenas mendorong agar terjadi sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota (Kementerian PPN/Bappenas, 2022).

Peran BPS Pusat dan Daerah dalam Regsosek mencakup koordinasi dan permintaan dukungan dari institusi yang sejajar. Koordinasi dan permintaan dukungan dari menteri/kepala lembaga dilakukan oleh BPS RI, sementara hal yang sama juga dilakukan oleh BPS di tingkat provinsi kepada kepala pemerintahan provinsi/gubernur. Begitu juga koordinasi dilakukan BPS wilayah/kabupaten/kota kepada pemerintah kabupaten/kota. Sosialisasi dan edukasi internalisasi serta publisitas dilakukan di setiap level pemerintahan tersebut. Agar Regsosek dapat dimanfaatkan secara luas dan dalam jangka panjang maka proses pemutakhiran data Regsosek direncanakan secara berkala dan terintegrasi (BPS, 2022). Pemerintah pusat dan daerah dapat memanfaatkan data dari Regsosek sebagai bahan pembuatan kebijakan dan program khususnya untuk penerima bantuan sosial, penghapusan kemiskinan ekstrim, dan pemberdayaan masyarakat secara tepat, baik sasarannya, waktunya, dan jumlahnya, serta dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi. Pendataan Regsosek akan menghasilkan data terpadu, data itu tidak hanya digunakan untuk program perlindungan sosial saja, melainkan digunakan untuk keseluruhan program yang dibutuhkan masyarakat,

untuk kepentingan perencanaan dan evaluasi pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

1. Kepentingan Daerah pada Data Regsosek

Regsosek merupakan langkah untuk mendukung program pembangunan yang komprehensif di bidang sosial ekonomi agar data yang dihasilkan dapat digunakan pemerintah dan pemangku kebijakan dalam menyalurkan program yang tepat sasaran dan tepat manfaat. Selama ini, kerap kali data penerima manfaat bantuan saling tumpah tindih dan terkadang sulit untuk diakses secara terbuka. Sebaliknya, pemerintah daerah yang memiliki program dan inisiatif penyaluran bantuan memerlukan data pelayanan/program tersebut. Namun, data komprehensif mengenai target dan kriteria masyarakat penerima manfaatnya belum tersedia. Fungsi pendataan memegang peran vital sebagai kunci pengalokasian sasaran program dan bantuan. Ketersediaan basis data dapat membantu menilai ketepatan target penerima manfaat. Di sisi lain, pembaruan data perlu terus menerus dilakukan sejalan dengan dinamika masyarakat.

Regsosek memiliki peran penting karena kemampuannya menghasilkan satu data dalam mendukung program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Regsosek diharapkan dapat menjawab permasalahan yang kerap muncul terkait program pemerintah. Selama ini, data perlindungan sosial terpisah-pisah. Masing-masing kementerian dan dinas memiliki data sendiri-sendiri sesuai kebutuhan mereka dan sering kali muncul persoalan ketika ada program intervensi dari pemerintah. Data sering tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan karena tidak *terupdate* secara cepat dan dapat pula tidak akurat. Ada warga yang seharusnya mendapat bantuan malah tidak mendapatkan, demikian sebaliknya, warga yang tidak termasuk kriteria penerima justru mendapat bantuan. Kegiatan Regsosek pun tidak sebatas pendataan, namun merupakan pengelolaan data secara berkelanjutan.

Reformasi sistem kerja pada pelaksanaan Regsosek 2022 dilakukan di tingkat kabupaten/kota, melalui kolaborasi dan koordinasi antar perangkat daerah. Bupati/wali kota mendapat arahan dari presiden melalui gubernur dengan memberi instruksi kepada seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung dan berkolaborasi dengan BPS di tingkat kabupaten/kota. Sementara di tingkat kecamatan, Koseka berkoordinasi dengan camat untuk mendapat dukungan kegiatan Regsosek. PML dapat berkoordinasi dengan lurah/kepala desa, dan PPL dapat berkoordinasi dengan ketua/pengurus SLS dalam rangka pelaksanaan pendataan lapangan.

D. Pelaksanaan Regsosek di Kota Surakarta

Target pendataan Regsosek di Kota Surakarta (Solo) adalah seluruh penduduk yang bermukim di Kota Surakarta, baik penduduk yang ber-KTP, atau ber-KK (kartu keluarga) di Kota Surakarta maupun yang tidak (ber-KTP dan ber-KK) Solo, tetapi tinggal di Solo. Kepala BPS Kota Surakarta harus memastikan tidak ada penduduk yang terlewat. Jika mengacu pada sensus penduduk 2022 (BPS Kota Surakarta, 2020), jumlah penduduk di Kota Surakarta sekitar 522 ribu orang, dan pada 2022 jumlahnya sudah berkembang lagi.

Berdasarkan pemantauan di lapangan, pelaksanaan Regsosek di Kota Surakarta (Solo) berjalan lancar. Berbagai upaya dari Pemerintah Kota Surakarta telah dilakukan. Wali Kota Surakarta mengintruksikan bahwa seluruh kades, lurah, camat, beserta lembaga/dinas mendukung penuh kegiatan Regsosek. Regsosek memiliki basis data tunggal sebagai arah tujuan pembangunan sehingga semua program perlindungan sosial masyarakat dapat berjalan lancar. Sejalan dengan penyampaian Kepala BPS Kota Surakarta, BPS RI, dan BPS Provinsi Jawa Tengah di awal November (Gambar 6.6), menyatakan ada tiga hal penting dalam pelaksanaan Regsosek, yaitu kolaborasi, koordinasi, dan integrasi. Kepala BPS Kota Surakarta menyampaikan bahwa kolaborasi dilakukan antara OPD dan BPS Kota Surakarta. Koordinasi dilakukan dengan keterbukaan komunikasi antar OPD



Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.6 Pertemuan Peneliti BRIN bersama Kepala BPS Kota Surakarta, BPS Provinsi Jawa Tengah, dan BPS Pusat

untuk kelancaran Regsosek. Integrasi antar OPD dan BPS dilakukan agar data yang dihasilkan BPS dapat dipergunakan secara bersama. Dengan tiga hal penting tersebut, data yang terkumpul diharapkan merupakan data yang berkualitas.

Mayoritas petugas lapangan yang menjadi mitra BPS Kota Surakarta adalah mahasiswa, dan Karang Taruna. Petugas lapangan mendapatkan pelatihan selama dua hari dengan 16 instruktur daerah. Petugas pendataan lapangan diterjunkan di lima kecamatan di Kota. Setiap petugas pendataan lapangan ditargetkan mengumpulkan data sebanyak 250 kepala keluarga (KK). Di Kota Surakarta telah direkrut 800 petugas lapangan, yang terdiri dari 20 Koordinator Sensus Kecamatan (Koseka), 156 Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dan 624 Petugas Pendataan Lapangan (PPL).

Mekanisme perekrutan petugas lapangan dilakukan melalui metode seleksi dari *database* mitra yang memenuhi kriteria. *Database* mitra merupakan sekumpulan informasi yang berisi biodata serta rekam jejak mitra BPS yang pernah/sedang bertugas dalam sensus/survei yang dilakukan BPS. Melalui *database* mitra ini, BPS Kota Surakarta memperoleh petugas yang cukup berkualitas. Para mitra



Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.7 Koordinasi untuk berkomunikasi dengan pemangku wilayah.

BPS yang telah terseleksi mendapat pelatihan, dilanjutkan dengan berbagai kesempatan untuk berdiskusi sebelum terjun ke lapangan.

Berbagai kendala yang mungkin terjadi di lapangan sudah diantisipasi oleh BPS Kota Surakarta, khususnya terkait kesediaan warga untuk menerima kedatangan Tim Pendataan. Melalui rapat koordinasi antar OPD, BPS juga melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku wilayah (Gambar 6.7), bahkan sampai ke tingkat RT. Koordinasi ini diharapkan dapat mengatasi kendala yang ditemui di lapangan dan warga yang didata menerima dan memberikan informasi dengan jujur.

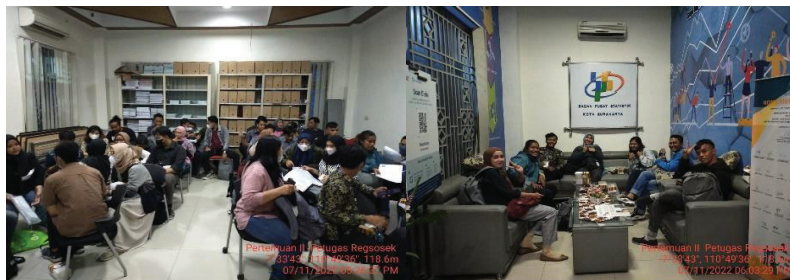


Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.8 Konsolidasi Mitra BPS Kota Surakarta dalam Penentuan Strategi Pendataan Regsosek

Berbagai lika-liku proses pendataan dialami petugas pendata. Para petugas pendata melaksanakan beberapa konsolidasi (Gambar 6.8) dan merumuskan strategi pendataan untuk menghindari dan mengantisipasi kendala yang muncul. Strategi yang dirumuskan dan dijalankan di lapangan dianggap berhasil oleh para pendata, yaitu secara rutin bertemu dengan PML dan Koseka di wilayah kerja masing-masing.

Penelusuran informasi tersebut juga dilaksanakan oleh peneliti BRIN, BPS di level Pusat, Provinsi Jawa tengah dan Kota Surakarta (Gambar 6.9) sehingga informasi yang disampaikan PPL, PML, Koseka, dan BPS adalah valid. Teknik ini merupakan teknik triangulasi data, seperti yang dijelaskan Sugiyono (2016).

Pendataan Regsosek mencakup dua tahap. Tahun 2022 ini merupakan pelaksanaan pendataan, dan pada tahun 2023 merupakan tahap pengolahan data dan konsultasi publik. Forum konsultasi publik adalah forum penyampaian hasil Regsosek kepada masyarakat pada tahun 2023. Meskipun Regsosek sedang berjalan, Pemerintah Kota Surakarta sudah meminta BPS Kota Surakarta memperbarui (*updating*) data sensus Regsosek 2022. *Updating* data ini menurut Pemerintah Kota Surakarta cukup penting untuk kebutuhan program-program pemerintah kota, khususnya dalam hal intervensi pemberdayaan



Keterangan: (a) Diskusi dengan BPS Kota Surabaya; (b) Observasi Lapang Proses Pendataan
Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.9 Peneliti BRIN, BPS Pusat, Provinsi dan Kota Surakarta



(a)

(b)

Keterangan: Penjelasan disampaikan di (a) ruang kantor secara formal, (b) lapangan

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.10 Peneliti BRIN mendapat penjelasan pelaksanaan Regsosek dari BPS.

masyarakat. Dengan data yang *up to date*, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), dan penyusunan APBD kota dapat disiapkan satu tahun atau minimal enam bulan sebelumnya. Sementara pada kasus kegiatan yang mendesak, data Regsosek dapat memberi gambaran data paling aktual. Penelaahan tentang Regsosek dilakukan pendamping kegiatan lapangan dari BPS RI. BPS Provinsi turut terlibat sebagai koordinator kegiatan lapangan dalam cakupan wilayah Jawa Tengah. Penanggung jawab Regsosek Kota Surakarta (Kepala BPS Kota Surakarta) pun turut memantau Koseka, PML, dan PPL.

Para pengelola kegiatan Regsosek sangat memahami pentingnya Regsosek untuk pencapaian satu data Indonesia. Penjelasan dan pendampingan dari BPS Pusat, BPS Provinsi, dan BPS Kota Surakarta memberikan penjelasan yang sangat jelas tentang mekanisme dan alur kerja Regsosek (Gambar 6.10). Seluruh komponen dari BPS turut membantu petugas lapangan agar pelaksanaan pendataan berjalan dengan lancar (Gambar 6.11). Seluruh komponen dari BPS ikut mensosialisasikan kegiatan Regsosek agar masyarakat turut berpartisipasi dalam pendataan.

“Kami mengajak masyarakat dan kita semua mendukung terlaksananya pendataan Regsosek di Kota Solo untuk terwujudnya



Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.11 Peninjauan pelaksanaan Regsosek di Kelurahan Semanggi

satu data program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ungkap kepala BPS Kota Surakarta (Gambar 6.9). Seluruh aparat pemerintah kota, menurut Kepala BPS juga harus memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa Regsosek adalah salah satu upaya pemerintah mewujudkan satu data kependudukan Indonesia. Pemanfaatan Regsosek harus dimaksimalkan untuk perencanaan dan implementasi program pembangunan di pemerintah kota sampai unit terkecil (RT).

Proses identifikasi program bantuan dapat berjalan cepat dan sesuai target yang disasar apabila menelaah komponen data dalam



Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.12 Informasi Regsosek dan Program Pembangunan di Kota Surakarta di TV Lokal

Regsosek yang sudah komprehensif. Pemahaman para pengelola Regsosek yang baik ini disosialisasikan oleh pemerintah kota secara masif melalui saluran televisi lokal yang dipasang di setiap kelurahan (Gambar 6.13), bahkan di beberapa titik sampai ke RT agar masyarakat memahami kegunaan Regsosek dan tidak salah memahami tujuannya. Regsosek yang merupakan basis data lengkap sehingga perlu dimutakhirkan secara berkala hingga di tingkat kelembagaan masyarakat yang terkecil (RT/RW).

E. Antara Nilai Positif dan Tantangan dalam Mendata

Seorang pria paruh baya berusia 66 tahun dengan sabar menunggu petugas pendata dan pendamping. Antusiasmenya terlihat dari raut muka dan intonasi bicaranya yang ingin segera berbagi banyak cerita tentang kampung yang sedang berbenah, yang saat ini berganti nama menjadi Kampung Harmoni (Gambar 6.13). Bersama dengan dua ibu rumah tangga penerima manfaat, pemuda tersebut menunjukkan jalan menyusuri gang ke lokasi bangunan rumah yang akan ditempati sebagai hunian baru setelah serah terima fasilitas relokasi. Di tengah perbincangan, beliau memperkenalkan diri, “Perkenalkan, saya Nur Rachmad, usia 66 tahun, anak 7, istri 1, Ketua RW 23 Kampung Semanggi yang kini menjadi RW 1 RT 2 Kelurahan Mojo setelah pemekaran.” Beliau melanjutkan, “Saya asli putra daerah, Mbak. Sejak muda jadi ketua RW di sini, sekarang jadi RW 1 RT 2 Kelurahan Mojo, kalau dulu RW 23 sini, Mbak.”

Beliau menceritakan dengan sangat runtut dan cepat bagaimana arus berbagai program keluar masuk ke kampungnya setelah dinyatakan sebagai kampung paling kumuh se-Kota Solo berdasarkan peringkatpendataan yang ditengarai dari OPD (Gambar 6.13). Bantuan yang pernah masuk mulai dari *World Bank*, SMF, Gojek, PLN, PDAM, Bank Solo, Bang Jateng dan diceritakan oleh Pak Nur dengan kontribusinya masing-masing. Perbaikan fasilitas air layak minum, fasilitas sanitasi, listrik, pembangunan infrastruktur paving

jalan, sampai dengan lampu penerangan. Tingginya arus migrasi dari pinggiran Solo menyebabkan daerah tersebut menjadi kawasan kumuh dan padat penduduk.

Secara historis kampung tersebut awalnya adalah kandang ayam. Pelaku ekonominya adalah pendatang dari luar Semanggi. Sejak zaman kolonial maupun pasca kemerdekaan, kenaikan jumlah penduduk di perkotaan menjadi fenomena yang kurang mendapatkan antisipasi baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun Indonesia (Basundoro, 2022). Selain upaya preventif seperti pembatasan jumlah kelahiran dan pengurangan arus migrasi, rupanya juga dibutuhkan penggerak ekonomi sebagai daya dukung yang memadai.

Menurut beberapa penelitian demografis, beberapa kota mengalami lonjakan migrasi karena minimnya perkembangan di kota sehingga arus perpindahan penduduk hanya mengalir di kota-kota tersebut. Beberapa kota tersebut adalah Jakarta, Surabaya, Semarang, Bandung, Surakarta, Yogyakarta, dan Makassar pasca perang (Wertheim & Giap, 1962).

Apabila dirunut dari sejarah tata ruang, kota-kota di Indonesia, pada masa kolonial memang tidak didesain untuk menampung



(a)

(b)

Keterangan: (a) saat meninjau perumahan dari pemerintah; (b) Saat wawancara berlangsung

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.13 Bersama Ketua RW 01 dan Kader PKK Kelurahan Mojo

tingginya lonjakan penduduk (Heuken & Pamungkas, 2021). Surakarta merupakan kota utama di Solo Raya yang menanggung efek domino dari urbanisasi.

Urbanisasi berlebih pada titik tertentu akan menghasilkan beberapa kondisi, yaitu pengangguran, setengah pengangguran, dan pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi. Perubahan struktur kota secara terus menerus akan menyebabkan kondisi yang disebut *transposisi*, yaitu suatu perluasan mendadak dari masyarakat kota yang mendorong perebutan ruang. Nur Rachmad sendiri menyadari bahwa Kampung Semanggi mayoritas dihuni oleh pendatang dengan ekonomi sangat rendah, yakni sekitar 56 unit rumah di tanah Bengawan Solo. Kondisi ekonomi pendatang yang rendah dan jauh dari lokasi asal, membuat mereka menggelar alas tidur di atas lokasi kandang, setelah selesai berjualan ayam. Pak Nur menerangkan, “Dahulu bukan untuk hunian. Dahulu sini itu kandang ayam, Mbak lalu dijual jadi kandang kambing dan sekarang jadi kandang orang. Dahulu kalau hujan susah, pasti bocor dan banjir.”

Saat ini lokasi tersebut sudah aman dari banjir. Banjir yang tercatat paling parah menurut kesaksian Nur Rachmad dan warga setempat adalah pada tahun 1966, setelah peristiwa G30S PKI terjadi banjir besar. Pada saat itu, belum terdapat parapet seperti sekarang sehingga tiap bulan dapat dipastikan selalu banjir saat musim hujan. Tahun 2007 adalah tahun terakhir bagi warga Nur Rachmad dan warga Kampung Harmoni merasakan banjir besar. Beliau menjelaskan, “Sewaktu bapak kecil, ngungsi ke barat tanggul. Dahulu ngungsi itu yang dibawa alat rumah tangga yang terbuat dari tanah, seperti lemper, gentong, pengaron, jembatan, klenting, dan sebagainya karena belum ada *magic com* elektronik seperti sekarang”.

Mekanisme pemindahan warga calon penghuni Kampung Harmoni menggunakan skema *Land Consolidation*, yakni warga dipindahkan sementara kemudian dipindahkan kembali setelah lahan selesai ditata. Warga yang dipindahkan sementara menempati Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan membayar kontribusi sebesar Rp130.000,00 per bulan sejak tahun ini, setelah sebelumnya

digratiskan selama dua tahun pertama. Kondisi ini menurut Nur Rachmad belum tentu dinikmati oleh warga dari RW lain karena beliau mengaku jika fasilitas tersebut didapat dengan proses panjang dan juga negosiasi dengan berbagai pihak untuk memperjuangkan bantuan tersebut agar terealisasi di kampungnya. Pak Nur Rachmad menjelaskan alasan dibalik usahanya untuk memperjuangkan warganya. Beliau menegaskan bahwa kondisi riil dirinya dan warganya harus dilaporkan apa adanya. Beliau mengatakan, “Itu kan ada pasal untuk memanipulasi data kena denda uang lima puluh juta kan, jangan sampai menipu tim survei. Jadi, apa adanya saja, jangan karena ingin bantuan lalu merubah data, kami yang dituakan harus cerewet.”

Sebelum tertata seperti saat ini (Gambar 6.14), memperkenalkan diri sebagai warga Kampung Semanggi menjadi beban tersendiri bagi gadis dari kampung tersebut. Pasalnya, selain kumuh, Kampung Semanggi berdekatan dengan lokasi Kampung Silir. Kenyataan ini tentu berpengaruh terhadap pola interaksi dan relasi sosial yang terbangun antara pemuda di kampung tersebut dengan masyarakat luas. Remaja gadis yang berasal dari kampung tersebut dulunya merasa malu ketika berkenalan dengan pemuda dari luar kampungnya. Sekilas terdengar biasa saja, tetapi kondisi ini menyebabkan mereka pada akhirnya menikah dengan sesama warga kampung tersebut sehingga kondisi sosial ekonomi cenderung tidak mengalami perubahan. Pasca



Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.14 Perumahan yang disiapkan Pemerintah Kota Surakarta bagi Warga Kampung Harmoni

kampungnya dijuluki sebagai kampung kumuh, berbagai program dan bantuan berdatangan demi menghilangkan stigma kumuh yang terlanjur melekat selama bertahun-tahun.

Berbagai bantuan itu tidak serta merta merubah jenis pekerjaan dan penghasilan warga, tetapi Nur Rahmat mengakui bahwa setidaknya apa yang diintervensikan ke Kampung Harmoni selama ini dapat mengubah perilaku warganya untuk menghindari perilaku kumuh seperti yang melekat pada kampung mereka selama belasan tahun. Penataan kampung yang difasilitasi tempat/taman rekreasi warga kampung yang dilengkapi himbauan dipasang sebagai pembelajaran warga (Gambar 6.15).

Saat ini, para pendatang yang menetap di Semanggi sudah memiliki dokumen kependudukan dan administrasi untuk mengakses berbagai jaminan dan program pemerintah seperti BPJS, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Keluarga Sejahtera, Program Keluarga Harapan, Bantuan Langsung Tunai, dsb. “Kalau untuk fasilitas hidup, di Solo ini memang sangat dimanjakan,” ungkap Nur Rachmad. Nur Rachmad bercerita panjang tentang bagaimana perbedaan pembangunan saat ini dengan yang pernah dia saksikan di masa lalu.



Keterangan: (a) Perahu Rojomolo; (b) Himbauan di bawah perahu Rojomolo Kampung Harmoni

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.15 Tempat Rekreasi Warga Kampung Harmoni

Pada tahun 1988, ia dan warga Kampung Semanggi yang tinggal di atas tanggul diharuskan untuk pindah. Beliau menolak untuk pindah karena merasa harga tanah lebih mahal lima kali lipat dari uang ganti rugi pemerintah. Pada akhirnya, Nur Rachmad sempat dituduh sebagai eks-PKI karena penolakannya terhadap relokasi dianggap mengganggu program pembangunan nasional. Kesaksiannya terhadap dinamika pendataan maupun program pemerintah menggambarkan perbedaan yang signifikan, terutama terkait asas keterbukaan.

“Dulu namanya ganti rugi memang rugi betul, Mbak. Kalau sekarang ganti untung, sekarang rumah yang kami tempati semua punya IMB. Anak saya namanya proyek, Mbak karena lahirnya pas banyak proyek. Dulu mau diukur buat apa, ditanya jawabnya tertutup, kalau sekarang semua terbuka, Mbak. Sekarang *nguwongke*, Mbak. Mau pendataan apa-apa ke RW dulu, *home visit* sekarang langsung meng-*uwongke* sama lembaga, sebelum ke lapangan ke RW dulu, lantas ke RT, sosialisasinya banyak kalau ada bantuan pasti kami kawal sekecil apapun itu.” (Nur Rachmad, November 2022)

Mudahnya penerimaan warga di RW yang ditempati oleh Nur Rachmad terhadap proses pendataan berkaitan dengan realisasi program-program yang selama ini dapat mereka akses dan meningkatkan taraf hidup mereka. Di satu sisi, pada awalnya Nur Rachmad dan warga yang lain merasa malu setelah mendengar bahwa menurut data pemeringkatan kampung mereka menduduki posisi teratas kampung terkumuh di kotanya. Namun, stigma tersebut justru menjadi pintu masuk berbagai program yang saat ini mereka rasakan. Nur Rachmad sebagai ketua RW bertahan dari tahun ke tahun melihat hal tersebut sebagai peluang sekaligus tantangan di kampungnya. Dia sadar bahwa “data” memiliki kekuatan yang besar untuk menggerakkan jejaring intervensi terhadap permasalahan sosial-ekonomi di kampungnya. Ketika kami menanyakan terkait bagaimana persepsi warga RW 01 Kampung Harmoni terkait pendataan, menurut mereka pendataan identik sebagai salah satu

rangkaian proses sebelum mendapatkan bantuan. Dengan *track record* penyaluran bantuan di Kampung Harmoni, mereka terbuka dengan pendataan apapun. Sampai seorang penerima manfaat bernama Denis mengatakan bahwa kami ini miskin ekstrim mbak, meskipun dalam gaya bahasa bercanda, tetapi setidaknya mereka juga mengobservasi pendata. Mereka menemukan istilah miskin ekstrim dari kuesioner maupun instrumen yang tidak sengaja mereka lihat ketika menanyakan pendataan apa yang sedang mereka hadapi.

Tantangan yang berpotensi dihadapi di masa mendata adalah bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pendataan bukan hanya tentang proses terhadap akses bantuan, melainkan pendataan merupakan rangkaian proses untuk mengetahui kondisi riil kependudukan sesuai dengan apa yang mereka alami saat ini. Meskipun hal ini sudah berulang kali disampaikan kepada perangkat desa sampai tingkat RT, tetapi masyarakat terutama lansia tetap menaruh harap terhadap bantuan di kemudian hari. Tantangan kedua adalah tentang kepadatan penduduk yang terlihat dari masing-masing rumah yang rata-rata dihuni antara 5—7 orang. Secara teknis, jumlah penghuni dalam satu rumah menentukan durasi pengisian kuesioner proses pendataan Regsosek, apalagi dengan informasi bersifat privasi dan tidak semua anggota keluarga mengerti sehingga harus diklarifikasi kepada yang bersangkutan dan belum tentu dapat ditemui dalam satu waktu. Hal ini menjadi tantangan pendataan di kampung padat penduduk.

F. Dukungan Kelembagaan Sosial dalam Pendataan

1. Kelembagaan Adat Keraton Surakarta Hadiningrat dalam Proses Pendataan Regsosek

Sebagai makhluk sosial, manusia tentu memiliki keterikatan terhadap kelompok yang mengikatnya melalui norma dan aturan, yang mana pengaturan tersebut berkaitan dengan penggunaan ruang secara fisik. Sebagaimana yang sering diajarkan di bangku sekolah,

bahwasannya keberadaan lembaga sosial disinyalir mempunyai peran dan arti yang sangat penting untuk mencapai keteraturan sosial yang memungkinkan struktur sosial di masyarakat mampu berperan dan berfungsi dengan baik (Padmiati, 2013). Solo masih memiliki peninggalan berupa Keraton Surakarta Hadiningrat yang kini menjadi simbol warisan budaya. Keberadaan Keraton Solo memberi warna tersendiri bagi dinamika lembaga sosial yang ada di kota Surakarta dengan luas sekitar 44 kilometer persegi dan berpenduduk sekitar 523 ribu jiwa (BPS Kota Surakarta, 2020). Segala aturan mengenai kehidupan sosial di wilayah keraton diatur oleh Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta. “Kerajaan Surakarta sudah berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka,” ungkap Gusti Moeng.

Di awal proses pendataan, Gusti Moeng selaku Ketua Lembaga Dewan Adat memberikan pengantar singkat mengenai kejayaan masa lalu yang dipimpin oleh trah leluhurnya. Keraton Surakarta Hadiningrat merupakan pemukiman keluarga Raja Sri Susuhunan Pakubuwana XIII, berada di wilayah Kawasan Baluwarti, yang dibatasi oleh dua tembok tinggi (benteng) dan besar seperti terlihat saat akan memasuki wilayah Kraton Surakarta (Gambar 6.16).



Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.16 Berkumpul di Depan Benteng Keraton Kasunanan Surakarta

Wilayah Baluwarti berada di lingkaran ke dua (di luar/setelah) tembok Kedhaton. Hanya Raja (Sri Susuhunan Pakubuwana XIII) yang menempati Kedhaton. Di luar (tembok) Kedhaton inilah terdapat kompleks (bangunan) yang dihuni oleh para pangeran, bangsawan, kerabat, dan abdi dalem. Ada dua pintu (Kori Brajanala (Gapit)) di dalam benteng Keraton Surakarta (Baluwarti), yaitu di bagian utara dan selatan, sebagai akses penghuni berhubungan dengan masyarakat luar.

Keraton Surakarta Hadinigrat merupakan salah satu kerajaan yang masih berdiri meskipun tidak memiliki kekuasaan dalam mengatur tata pemerintah saat ini. Keraton Surakarta hanya sebagai simbol budaya (Walikota Surakarta, 2011). Kegiatan budaya terus dilakukan oleh Keraton Kasunanan Surakarta demi menjaga warisan budaya, seperti koleksi peninggalan kerajaan (Gambar 6.17) untuk tetap dilestarikan dari masa ke masa dengan bantuan para abdi dalem.

Para keturunan kerajaan tetap merupakan warga negara yang dikunjungi oleh petugas Regsosek dan berkewajiban menyampaikan informasi terkait kondisi sosial ekonominya. Salah satu peraturan keraton mengharuskan keturunan yang sudah menikah harus meninggalkan keraton. Hal ini menjadi suatu tantangan tersendiri



Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.17 Berbagai Peninggalan Kerajaan yang diabadikan di Museum Keraton Kasunanan Surakarta

dalam proses pendataan (Regsosek) karena mereka berdomisili di luar keraton Surakarta, tetapi tetap dengan KTP di Kedaton.

Namun, mengacu pada ketentuan Regsosek, maka keluarga raja (pangeran, bangsawan, kerabat raja) didata di tempat tinggal masing-masing, kecuali Ketua Lembaga Adat Keraton. Pendataan di lingkungan keraton didampingi oleh Kepala BPS Solo secara langsung meskipun proses pengisian kuesioner tetap dilakukan oleh PPL dan dipantau oleh PML yang bersangkutan. Berkaitan dengan strategi momentum dalam pendataan, maka proses pendataan Ketua Lembaga Adat Keraton Surakarta dilakukan di keraton (Gambar 6.18). PPL yang dipilih adalah PPL yang muda sebagai strategi dalam menanyakan beberapa hal yang menyangkut kepemilikan pribadi, penyakit dan lain-lainnya. Dengan strategi tersebut, keluarga keraton yang didata bersedia menceritakan data dengan sejujurnya.



Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.18 Pendataan di Keraton Surakarta

Sebagai kelembagaan Adat, Keraton Surakarta tidak terlibat secara langsung dalam pendataan Regsosek warganya. Namun, beberapa kerabat masih tergabung sebagai perangkat kalurahan. Berbeda halnya dengan Keraton Yogyakarta yang masih aktif dalam politik pemerintahan, Keraton Surakarta hanya berdiri sebagai simbol dan warisan budaya sehingga apabila kerabat dan keturunan keraton

ingin berpartisipasi terhadap politik pemerintahan formal, mereka harus memperoleh status sosial itu melalui proses pemilihan umum. Hal ini yang dilakukan oleh Gusti Raden Ajeng Koes Moertiyah (Gusti Moeng), putri Susuhunan Pakubuwono XII, beliau sempat menjadi anggota DPR. Pengalaman di dunia politik membuat beliau terbiasa dengan proses pendataan karena setiap pemilihan di ranah politik pasti melalui pendataan kekayaan.

Dalam lembaga adat, terdapat masing-masing pembagian urusan yang didalamnya diketuai oleh anak cucu raja. Masing-masing urusan memiliki abdi dalem sebagai penggerak roda di aras paling bawah. Sampai saat ini, Indonesia berkali-kali mengalami dinamika sosial ekonomi, krisis dan inflasi. Namun, gaji abdi dalem tidak mengacu pada dinamika tersebut, melainkan ketetapan raja dengan bersandar pada nilai "*ngalap berkah ndalem*". "Sepuluh ribu dari raja sama sepuluh ribu dari kita bagi mereka itu beda, Mbak," ungkap Pak Bambang yang merupakan perwakilan pihak BPS.

Pak Bambang yang notabene namanya masih mengandung unsur kerajaan karena berawalan dengan huruf R, menjelaskan bagaimana para abdi dalem memandang harta dan pengabdian. Mereka merasa cukup tinggal di rumah tua yang dipinjamkan oleh raja, sebagian dari mereka mengais rejeki dari sumber pendapatan lain seperti berdagang. Secara turun temurun, mereka menempati rumah di atas lahan milik raja. Gaji yang diberikan kerajaan untuk abdi dalem bervariasi, tergantung urusan apa yang mereka pegang, dengan nominal yang berada di bawah UMR. Kondisi ini tentu berbeda dengan kondisi masa lalu, dimana kerajaan juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan sehingga dapat mengatur segala urusan dan kebijakan. Saat ini, keberadaan kerajaan hanya sebagai simbol dan kebutuhan abdi dalem sebagai warga tentu mengacu terhadap harga yang ditetapkan secara nasional. Begitu pula kebutuhan lainnya seperti biaya pendidikan, iuran kesehatan, tagihan listrik, dsb. Kebutuhan hidup yang meningkat rupanya tidak diimbangi dengan perubahan sistem penggajian abdi dalem. Cara pandang terhadap harta dan pengabdian yang seperti ini memerlukan intervensi dari

pemerintah agar mereka tidak terjebak dalam kemiskinan kultural maupun struktural.

Dengan menempati rumah di lahan milik keraton, mereka tidak memiliki sertifikat tanah sehingga mereka tidak dapat mengakses bantuan, baik dari pemerintah seperti bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) seperti di wilayah Semanggi dan Mojo maupun CSR dari perusahaan swasta. Pemerintah Kota Surakarta berusaha menyalurkan program di Kelurahan Baluwarti, tetapi terkendala dengan kepemilikan sertifikat lahan yang ditempati. Salah satu syarat realisasi program RTLH adalah calon penerima manfaat harus memiliki sertifikat tanah yang ditempati. Tanah itu bukan milik pemerintah kota, maka pembangunan daerah tersebut sedikit sulit direalisasikan. Hal ini sangat berbeda dengan kondisi Kampung Harmoni yang berbenah dari penduduk pendatang tanpa kepemilikan tanah hingga memiliki bangunan serta kelengkapan surat yang menyertai. Meskipun hal ini bukan termasuk kendala dalam pendataan Regsosek, tetapi kasus ini menjadi salah satu temuan permasalahan kependudukan terkait bagaimana kepemilikan aset dan modal menjadi salah satu unsur penting yang memengaruhi terwujud atau tidaknya suatu program pemerintah. Namun demikian, proses pendataan para abdi dalem berjalan dengan lancar.

2. Partisipasi Perangkat Desa dalam Pendataan Regsosek

Di sela perjalanan menuju Kampung Semanggi, diskusi yang terbangun ialah mengenai bagaimana penanggulangan kemiskinan di Kota Solo dan bagaimana keterlibatan personil yang ada terhadap proses Regsosek ini. Kota Surakarta memiliki Institusi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), tetapi mereka tidak dilibatkan dalam proses pendataan Regsosek. Selain karena mengikuti instruksi rekrutmen dari BPS Pusat, rupanya menurut informasi dari BPS Kota Surakarta, mereka ingin melakukan pendataan secara objektif dalam memandang kondisi sosial masyarakat. KPKD

dianggap sebagai institusi yang mengeksekusi kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.

Melalui penyebutan Satuan Lingkungan Setempat (SLS), proses pendataan Regsosek memberikan gambaran betapa pemaknaan status sosial ekonomi warga bukan hal yang sederhana. Untuk memberikan justifikasi apakah seseorang masuk dalam kategori cukup, miskin, atau sangat miskin rupanya perlu verifikasi dari komunitas setempat. Dalam hal ini, peran ketua RT dituntut untuk memiliki pengetahuan terhadap masing-masing kondisi rumah tangga yang ada di lingkungannya. Apabila proses pendataan ini berhasil dan dilakukan ulang sesuai periodenya, hal ini akan membentuk semacam struktur pengetahuan di benak masyarakat bahwa kondisi ekonomi *household* (rumah tangga) menjadi bukan lagi ranah privat, tetapi menjadi wacana komunitas. Metode verifikasi semacam ini mendorong individu-individu anggota rumah tangga menempatkan diri untuk menampilkan citra keluarganya di lingkungan komunitas. Setidaknya, mekanisme semacam ini memberikan semacam sistem pengawasan di tengah urbanisasi yang mendorong individu semakin abai terhadap lingkungan sekitar. “Kami merasa di-*uwongke*, Mbak. Jadi, tidak langsung ke warga, ke kami dulu.” (Nur Rachmad, Ketua RW Kampung Harmoni).

Dukungan lembaga atau perangkat warga, seperti ketua RW dan RT cukup besar di Kota Surakarta. Ketua RT 03 RW 03 Kelurahan Semanggi menyampaikan informasi bahwa sebelum Regsosek dilaksanakan, perangkat RW dan RT sudah mendapatkan informasi dari pemerintah Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta mengumpulkan para camat, sementara camat mengumpulkan para lurahnya, dan kelurahan mengumpulkan RW-RW di lingkungan kelurahannya. Ketua RW juga mengumpulkan para RT. Kemudian, Ketua RT 03 di RW 03 ini mengumpulkan warga setiap minggu. Pada perkumpulan mingguan itulah pak RT menyampaikan informasi mengenai Regsosek sehingga warga mendapat informasi sebelum Petugas Pendata Lapangan (PPL) datang *door to door*. Adapun warga yang menolak saat pendataan adalah mereka yang kebetulan

tidak hadir saat sosialisasi Regsosek oleh RT. Jika ada yang menolak, ketua RT merasa berkewajiban mendampingi pendata agar diterima di rumah warga tersebut. Selain itu, dari Pemerintah Kota Surakarta sendiri memfasilitasi media penyampaian informasi secara terpusat melalui saluran televisi lokal yang sudah secara otomatis tersambung dengan informasi resmi Pemerintah Kota Surakarta. Program tersebut adalah program Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta.

3. Pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi Pendataan

Sistem informasi dan teknologi pendataan Regsosek cukup canggih. *Dashboard monitoring* (Gambar 6.19) Regsosek memberi manfaat untuk melihat berbagai hasil dalam waktu tertentu. Pada Gambar 20 terlihat status pendataan pada titik waktu tertentu di (a) Kecamatan Pasar Kliwon, dan (b) di Kota Surakarta secara kumulatif. Hal ini sangat membantu para petugas di BPS dalam memonitor ketercapaian petugas pendataan di lapangan.

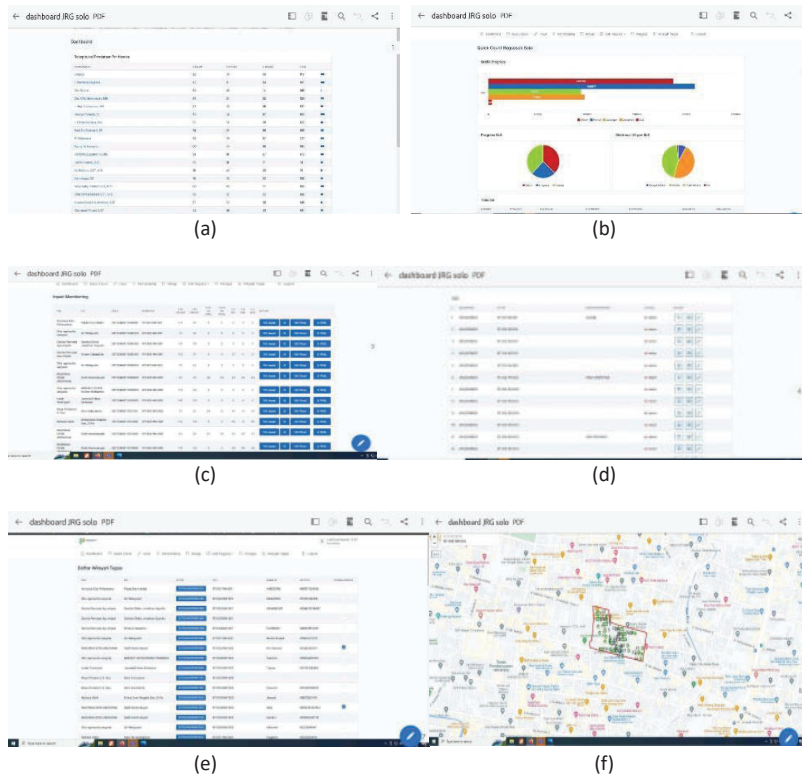
BPS Kota Surakarta pun membuat sistem informasi sendiri untuk memonitor segala kemajuan pendataan Regsosek. Dengan sistem informasi yang dibangun oleh BPS Kota Surakarta sendiri, Kepala BPS dapat memonitor berbagai kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan.



Keterangan: (a) Di Kecamatan Pasar Kliwon; (b) Di Kota Surakarta

Sumber: BPS (2022)

Gambar 6.19 Tampilan Sistem Informasi Regsosek melalui *Dashboard Monitoring*



Keterangan: (a) Rekapitulasi Pendataan per Koseka; (b) *Quick Count* Regsosek Solo; (c) Input *Monitoring*; (d) Daftar Pendamping; (e) Daftar Wilayah Tugas, (f) GeoTagging di Kota Solo

Sumber: BPS (2022)

Gambar 6.20 Sistem informasi Regsosek Solo yang dibangun sendiri oleh BPS Kota Surakarta

G. Cerita Kehidupan Pendata

Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta merupakan dua kelurahan dengan pemukiman penduduk yang padat. Berada di dekat bantaran sungai Bengawan Solo, kedua wilayah ini memang sering dilanda banjir. Awalnya,

kedua kelurahan ini merupakan satu kelurahan, yaitu Semanggi. Seiring dengan bertambahnya kepadatan penduduk, maka kelurahan tersebut mengalami pemekaran. Pada tahun 2020, jumlah penduduk di Kelurahan Semanggi lebih dari 23 ribu jiwa, sementara penduduk yang berdomisili di Kelurahan Mojo berjumlah hampir 14 ribu jiwa (BPS Kota Surakarta, 2020).

Kelurahan Semanggi dan Mojo merupakan wilayah dengan program Penataan Kawasan Permukiman Tingkat Kota Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Kedua kelurahan menjadi sampel karena keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program Kotaku dan keberhasilan masyarakat dalam menerima dan bertransformasi, dari kebiasaan yang kumuh menjadi kebiasaan sehat dengan hunian sehat meskipun masih ada beberapa penduduk yang belum berpindah. Salah seorang penduduk yang belum pindah di wilayah Bantaran Sungai (Gambar 6.20.a) terlihat sangat kumuh dan tidak layak. Mereka menunggu kesiapan rumah yang sedang dibangun pemerintah Kota Surakarta untuk ditempati (Gambar 6.20 b).

Jika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2011 tentang Sungai, bantaran merupakan ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan



(a)

(b)

Keterangan: (a) Sebelum direkolasi; (b) Rumah layak huni yang sudah dipersiapkan pemerintah untuk relokasi warga di bantaran sungai Bengawan Solo.

Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.21 Tempat Tinggal di Bantaran Sungai Bengawan Solo Kota Surakarta.

palung sungai, yang sebenarnya berada di dalam sempadan sungai, yang berfungsi sebagai ruang penyangga antara ekosistem sungai dan dataran, agar fungsi sungai dan kegiatan manusia tidak saling terganggu, bukan untuk pemukiman.

Pada bagian ini, kami berusaha memotret proses pendataan yang dilakukan oleh PPL dan PML di wilayah Kampung Harmoni dan Semanggi. Karakteristik ruang sosial yang berhimpitan dan padat penduduk rupanya membutuhkan strategi khusus agar pendataan berjalan secara runtut dan sistematis. Berikut adalah beberapa cerita pendata yang tangguh yang dapat kami temani saat satu hari pendataan berlangsung.

1. ES–PML di Kelurahan Semanggi

Seorang remaja perempuan berbaju hitam sudah menunggu kedatangan kami di pintu gang RT 3 RW 3 Kampung Semanggi. Perempuan berinisial ES ini berusaha untuk tetap terlibat dalam obrolan dengan sesekali melihat ponsel yang ia genggam. Sebagai Petugas Pemeriksaan Lapangan (PML), dirinya harus *stand by* di depan layar ponsel untuk memantau keluhan dan progres pendataan dari masing-masing PPL yang dinaunginya. Kebetulan jarak usia ES dengan PPL tidak jauh berbeda sehingga pemaknaan terkait koordinasi lapangan menjadi lebih cair.

ES adalah salah satu petugas PML Regsosek di Kota Surakarta yang pada tahun ini baru saja menyelesaikan studi S-1-nya di UMS. ES berpengalaman menjadi panitera pengecekan kelengkapan berkas perkara. ES mengungkapkan bahwa salah satu alasannya menjadi petugas Regsosek adalah karena kebetulan mengetahui ada program Perekrutan Regsosek dari teman sehingga mencoba melamar. Regsosek merupakan pengalaman pertama ES bergabung, sebagai mitra BPS. Sebelum mendaftar, ES mempelajari Regsosek, bagaimana fungsi dan mekanisme kerjanya sehingga setelah mendaftar dan wawancara beliau diterima sebagai petugas pengawas lapangan (PML) di wilayah Semanggi. Pelatihan yang singkat (26–28 September 2022) tidak

membuat surut semangat. Selama pelatihan ES mencoba mengenal lebih dekat dengan PPL yang menjadi tanggung jawabnya. Berbagi pengalaman dan diskusi dengan PPL merupakan metode ES untuk saling mengenal karakter dan kemampuan. ES bukanlah warga lokal Semanggi sehingga ES melakukan survei ke lokasi sasaran kegiatan, bertemu dan diskusi dengan PPL, serta menyerahkan berkas yang perlu diisi datanya.

Tanggal 15 Oktober merupakan pendataan hari pertama Regsosek. Hari itulah ES mulai bekerja di lapangan dan mulai memantau PPL secara bergantian. Setiap tiga hari sekali data dari PPL dikumpulkan ke ES (PML). Verifikasi data dilakukan oleh ES setiap dokumen datang. Berdasarkan kinerja PLL, terdapat dua PPL berkinerja kurang sehingga harus dipantau secara ketat dan didampingi saat mendata masyarakat. Beberapa permasalahan pendataan di masyarakat masih ditemui, antara lain masih ada yang tidak mau menerima petugas pendataan. Oleh karena itu, ES mempersuasi warga dan meminta bantuan pak RT setempat untuk menjelaskan maksud pendataan di Regsosek. ES juga membaca buku pedoman atau diskusi dengan PML lain yang sudah berpengalaman atau berdiskusi dengan Koseka agar tidak salah melangkah.

2. NS–PML di Kelurahan Semanggi

NS merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro semester tujuh, yang bergabung dengan BPS pada program Regsosek ini. Meskipun masih tergolong muda, NS sudah banyak berpengalaman dalam pendataan sebagai mitra BPS. Sebelum di Regsosek, NS berpengalaman sebagai mitra BPS pada kegiatan Pemetaan Sensus Penduduk BPS tahun 2019, Sensus Penduduk tahun 2020, Sensus Penduduk *Long Form* tahun 2020, serta pemetaan Sensus Pertanian tahun 2022. Jadi, NS sudah bergabung dengan mitra BPS sejak 2019.

Saat itu NS sedang menunggu pengumuman penerimaan mahasiswa baru, mendapat *broadcast* pendaftaran mitra pemetaan sensus penduduk oleh BPS. Dengan informasi yang didapat, NS

mencoba mendaftarkan diri. Melalui berbagai tahapan pendaftaran, antara lain seleksi berkas, seleksi tertulis, dan wawancara, akhirnya NS dinyatakan lolos sebagai mitra BPS. Selesai kegiatan pemetaan Sensus Penduduk BPS tahun 2019 tersebut, pada tahun 2020 ketika ada pandemi Covid-19 dan perkuliahan dilakukan secara online, NS mendapatkan kembali informasi dari Koseka di BPS terkait kegiatan Sensus Penduduk. Kembali, NS mendaftarkan diri sebagai petugas pencacah lapangan sensus penduduk 2020.

Pada tahun 2022, NS mengikuti 3 pendataan yang dibuka BPS, yakni pemetaan Sensus Pertanian, Sensus Penduduk *Long Form* dan Regsosek. Jika dalam sensus sebelumnya NS menjadi Petugas Pendataan Lapangan (PPL), pada Regsosek NS sebagai pengawas lapangan (PML) yang bertugas mengawasi empat PPL di Semanggi. Menjelang pelaksanaan, seluruh petugas secara serentak mendapat pelatihan dari BPS Kota/daerah masing-masing. Setelah mendapatkan wilayah tugas dan dokumen yang dibutuhkan, NS dan PPL di bawah koordinasinya, berkumpul lalu secara bersama meminta izin ke kelurahan, sebagai tanda atau bentuk legitimasi kegiatan, dengan meminta (mendapatkan) tanda tangan lurah setempat dalam surat tugas sebagai petugas dan pengawas lapangan kegiatan Regsosek.

Setelah mendapatkan bukti legitimasi, NS dan para PPL di bawah koordinasinya (termasuk juga PML dan PPL di wilayah lain), melakukan penelusuran wilayah tugas dan mencari keberadaan rumah RT setempat. Penelusuran ini dilakukan untuk mengetahui batas wilayah tugas, perizinan, dan koordinasi dengan RT setempat bahwa NS dan 4 PPL yang diberi melakukan pendataan Regsosek di wilayah SLS (RT). Setelah memastikan tidak terjadi perubahan batas wilayah, NS dan empat PPL melakukan verifikasi dengan ketua RT mengenai nama penduduk yang tinggal di wilayah tersebut dan status kesejahteraannya. NS dan PPL juga meminta ketua RT wilayah sasaran pendataan untuk memberikan informasi kepada warganya agar warganya menerima petugas saat pendataan. Kemudian, pendataan dimulai di masing-masing wilayah.

Setiap pendataan berlangsung, NS meminta PPL yang di bawah koordinasinya memulai pendataan dari muatan terkecil, yaitu keluarga dengan jumlah anggota yang sedikit agar lebih mudah pengerjaannya. Mengingat tiga dari empat PPL di bawah koordinasi NS merupakan petugas yang baru pertama kali melakukan pendataan, maka strategi memulai dari jumlah keluarga terkecil, memudahkan mereka dalam menyelesaikan pendataan. Setiap dua atau tiga hari, mereka bertemu untuk mengumpulkan berkas pendataan dan melakukan evaluasi pada tahap pendataan yang telah dilakukan. Dengan berkumpul, mereka dapat bertukar pikiran dalam menyelesaikan permasalahan, misalnya ketika ada petugas yang kesulitan melakukan geotagging karena akurasi HP-nya terlalu tinggi, maka petugas lain dapat memberikan solusi berdasarkan pengalamannya saat melakukan *geotagging*.

Dalam berinteraksi dengan PPL, NS menjalin komunikasi melalui grup Whatsapps dan personal *chat*, untuk meminimalisir terjadinya miskomunikasi, NS mengajak petugas untuk berkumpul dan NS mendampingi PPL turun ke lapangan secara bergilir. Pada awal pendataan memang ada PPL yang sulit diajak berkumpul, bahkan jika dihubungi hanya dibalas dua hari sekali. Untuk kondisi tersebut, NS mencari informasi penyebabnya. Rupanya PPL tersebut sedang mengerjakan banyak kesibukan di kampus. Sebagai sesama mahasiswa, NS cukup paham, tetapi untuk mendisiplinkan diri pada tugas, NS memberikan waktu *deadline* pengumpulan berkas agar target PPL dalam menyelesaikan pendataan tidak tertinggal dengan teman-teman yang lain. Permasalahan tersebut terjadi pada minggu pertama pendataan. Saat ini, PPL tersebut sudah melaporkan perkembangan penyelesaian tugasnya secara rutin.

Di dalam pendataan sendiri berbagai permasalahan dijumpai petugas lapangan, antara lain, masyarakat yang tidak ingin didata karena identitasnya khawatir disalahgunakan. Selain itu, banyak juga masyarakat yang sulit ditemui karena bekerja atau KK tidak sesuai kondisi keluarga saat ini. Jika NS menemukan warga yang tidak bersedia didata, PPL memberikan penjelasan secara terperinci kepada warga tentang maksud pendataan Regsosek ini, baik dari segi manfaat

maupun cakupan data yang dikumpulkan. Apabila warga yang di data tetap menolak, PML menghadiri rumah tersebut dan menjelaskan pentingnya pendataan Regsosek bagi masyarakat. Jika mekanisme tersebut dijalankan belum membuahkan hasil, NS mengajak ketua RT agar warga tersebut percaya bahwa pendataan ini sudah mendapatkan izin dari RT dan dilakukan serentak se-Indonesia.

Menurut NS, sejauh ini permasalahan yang ditemukan di lapangan adalah permasalahan yang dapat diselesaikan dengan pendampingan dari ketua RT (saat pendataan). Masalah lain adalah PPL yang tidak memenuhi target. Pada satu kasus, dalam 3 hari sudah disepakati setiap PPL dapat mengumpulkan 30 dokumen K, tetapi ada PPL yang hanya mampu mengumpulkan 20 dokumen K. Biasanya hal tersebut terjadi karena sulitnya PPL bertemu dengan responden. Pada saat pagi-siang masyarakat sedang bekerja dan saat sore/malam hari cuaca tidak mendukung atau hujan deras sehingga pendataan tidak memenuhi target. Untuk memenuhi target pendataan, NS menetapkan *deadline* pendataan sehingga jika ada petugas yang tidak melakukan pendataan selama dua hari, pada hari selanjutnya ia harus melakukan menutupi ketertinggalannya sesuai target.

1. BP–PPL di Kelurahan Semanggi

BP adalah Mahasiswa UNS semester akhir yang sempat magang dalam persiapan pendataan sensus pertanian 2023 (Gambar 6.22). BP juga terlibat pada kegiatan BPS untuk demografi sosial serta Surakarta dalam Angka 2021. Di kampus pun pada, tahun 2021 BS menjadi ketua Program Pembinaan dan Pemberdayaan Desa Holistik (PHP2D) yang merupakan kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat desa, yang dilakukan oleh mahasiswa melalui kegiatan mahasiswa (UKM) dan/atau lembaga eksekutif mahasiswa di universitas tempat BP menimba ilmu.

Pertama kali BP menjadi mitra BPS adalah sejak magang di BPS Surakarta pada bulan Januari–Februari 2022 dalam pendataan Pemutakhiran Kerangka Geospasial & Muatan Wilayah Kerja Statistik



Foto: Nuzul (2022)

Gambar 6.22 BP bersama staf BPS dan peneliti BRIN saat bertugas mendata Regsosek

ST2023, dilanjutkan untuk kegiatan Regsosek bulan Oktober–November 2022 ini. Mendaftar di kegiatan Regsosek setelah mendapat informasi dari web BPS kemudian BP mengikuti *open recruitment* mulai dari tes sampai wawancara. Setelah dinyatakan lolos, BP mengikuti pelatihan selama 3 hari dan lanjut pada pendataan sejak tanggal 15 Oktober 2022. Interaksi dengan PML biasanya terfokus pada informasi awal yang diperlukan dalam Regsosek. Komunikasi berlanjut terkait tindakan yang harus dilakukan ketika ada kejanggalan/ketidak-biasaan kondisi di lapangan. Interaksi dengan PML juga dilakukan terkait penyerahan dokumen hasil pendataan untuk pengecekan (oleh PML). Dari pengalaman di lapangan, tidak semua penyelesaian permasalahan di lapangan secara pasti diketahui PML. Oleh karena itu, BP sebagai PPL bersama koordinator lapangan (PML), BP membawa permasalahan yang harus dipecahkan ke Koseka sehingga menemukan solusi dan memperjelas tindakan yang harus dilakukan PPL di lapangan.

Selama bertugas mendata di lapangan, ada masyarakat yang kurang kooperatif. Sebagai PPL, BP mencoba menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan dan manfaat pendataan Regsosek kepada responden, serta meyakinkan responden/masyarakat dengan menunjukkan kartu identitas (*id card*), surat tugas, hingga dokumen

yang distempel oleh RT. Apabila masih ada yang meragukan, BP meminta tolong PML untuk menemani dan meyakinkan responden yang kurang kooperatif ini. Jika masih saja belum kooperatif, BP sebagai PPL dan PML menginformasikan kepada ketua RT dan meminta tolong ketua RT yang meyakinkan warganya. Namun, sejauh ini BP belum menemukan kasus ada warga yang belum mau membuka diri untuk pendataan. Penyelesaian sampai di ketua RT, sudah memberi jalan pada BP untuk dapat mendata warga sasaran, yaitu di Kelurahan Semanggi.

Masalah yang sering dihadapi BP adalah ada beberapa responden yang tidak dapat menunjukkan informasi KK karena sesuatu hal. Hal ini diselesaikan dengan menanyakan berkas KK warga kepada ketua RT dengan terlebih dahulu meminta izin kepada keluarga responden untuk mengambil informasi KK dari berkas yg ada di ketua RT. Masalah lain adalah pengejaran target. Untuk mencapai penargetan, BP menerapkan target harian yang harus dicapai agar pendataan dapat diselesaikan sebelum *deadline*, baik mendata wawancara, melakukan *geotagging* dan foto kondisi rumah serta merapikan berkas hasil wawancara sebelum diserahkan ke PML. Permasalahan responden yang susah ditemui yaitu jarang berada di rumahnya karena bekerja di tempat lain. Hal ini diantisipasi oleh BP dengan meminta tolong kepada tetangga atau saudara terdekat atau ketua RT untuk menanyakan waktu luang warga agar PPL dapat datang saat warga berada di rumahnya.

Beberapa masalah lapangan sering dihadapi adalah cuaca yang mengharuskan BP untuk menyiapkan berbagai perlengkapan, seperti jas hujan, payung, dan plastik untuk melindungi dokumen agar tidak basah. Ada hal yang menyenangkan yang dirasakan BP sebagai PPL. Kebajikan masyarakat sekitar kepada PPL, seperti memberikan jamuan minuman, membantu menunjukkan rumah, membantu memanggil tetangga yang susah untuk ditemui, hingga membantu menjelaskan kepada masyarakat lain yang kurang paham. Hal ini sangatlah menyenangkan dan memberikan semangat kerja. Selain itu, bisa menjadi lebih banyak mengenal orang dengan berbagai keadaan.

Apabila dalam sehari sudah mencapai target (harian), terkadang BP lebih melamakan waktu wawancara agar warga dapat bercerita lebih lama dan PPL dapat menanyakan beberapa informasi lain yang diperlukan.

2. Pendata: Mitra Kerja BPS

Ada tiga kriteria petugas pendata yang kami temui di lapangan, dua diantaranya merupakan mitra BPS (PPL dan PML), sedangkan Koseka adalah bagian yang terintegrasi dengan BPS. Skema perekrutan yang berbeda ini tentu saja membawa implikasi berupa relasi bisnis yang terjalin antara keduanya. Mitra akan direkrut ketika suatu lembaga sedang membutuhkan tenaga meskipun dengan kriteria yang sudah disebutkan secara jelas, tetapi kegiatan kerja tidak terikat secara tetap. Untuk menjadi petugas pendata Regsosek, seorang mitra harus setidaknya memiliki kecerdasan spasial dan argumentasi yang cakap di lapangan. Dari ketiga petugas yang kami temui, rata-rata adalah pendatang dari luar Solo yang sedang atau baru saja menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi. Mereka diharuskan untuk mengetahui topografi suatu ruang perkampungan, dibekali peta per lokasi yang menjadi tanggung jawab penelitiannya dengan rute yang ditentukan.

Berbekal peta penunjuk arah dan *device*, mereka harus mencatat kondisi sosial ekonomi masing-masing rumah tangga yang notabene tidak mereka ketahui secara riil, tetapi harus mereka catat se-objektif mungkin. Rupanya penyebutan mitra dan mekanisme rekrutmen yang berdasarkan pada *track record* kerja di bidang pendataan dan enumerator mendorong mereka untuk bekerja secara profesional karena taruhannya adalah *track record* kerja di bidang tersebut. Melalui monitor kepala BPS, kinerja mereka terpantau *by device* sehingga terlihat persentase progres masing-masing petugas. Apabila diketahui performa mereka tidak optimal, hal ini akan mempengaruhi perekrutan di project BPS selanjutnya. Hal ini yang mendorong para petugas mitra melakukan segala cara dan strategi untuk mempermudah pengerjaan di lapangan. Ada sebagian dari mereka yang survei lokasi

terlebih dahulu, membangun rapor dengan perangkat desa, ada pula yang mengulang-ulang pertanyaan yang sama ketika bertanya hanya demi menguji konsistensi data. Kesalahan sebutir angka nol pun bagi petugas adalah representasi catatan kinerja mereka.

Pembinaan dan pendampingan dilakukan secara terus menerus oleh Koseka untuk menyamakan persepsi dan pengetahuan terkait keterlibatan dalam Regsosek di Kota Surakarta. Berulang-ulang kepala BPS dan petugas BPS Pusat menyampaikan, “Konsepnya harus sama, jika konsep yang dipegang berbeda, nanti akan lari kemana-mana.” Konsep yang dimaksud adalah bagaimana translasi dari pemahaman terkait pendataan, siapa yang dimaksud penduduk, bagaimana mekanisme *crosscheck* dan sebagainya ini ke dalam pemaknaan yang harus berada di luar kepala. Pertemuan antara Koseka, PML, dan PPL dilaksanakan untuk mengoreksi silang (*crosscheck*) antar petugas pendataan yang telah dilakukan oleh PPL. Pertemuan juga bertujuan mencari solusi untuk kendala atau permasalahan yang dihadapi di lapangan. Selain itu juga untuk menyamakan persepsi dan konsep para petugas Regsosek (PPL). Bagi Koseka, pertemuan antara PML dan PPL menjadi ajang memonitor perkembangan dan hasil pendataan Regsoses di tahap awal. Para petugas baik PPL dan PML diminta Koseka untuk selalu berkoordinasi dengan sesama atau dengan Koseka jika ada kendala-kendala di lapangan.

Salah satu kejadian tidak menyenangkan dialami oleh PPL di Kota Surakarta, Kecamatan Jebres, Kelurahan mojosongo, yaitu ada satu responden yang tidak ingin rumahnya diambil foto, padahal tingkat kesejahteraannya rendah (miskin) dan kondisi rumah harus diambil foto sebagai bukti kepada pemerintah, bahwa keluarga tersebut memang miskin. Hal ini pun dikonfirmasi oleh ketua SLS (RT) bahwa responden termasuk kategori miskin. Setelah responden diberi pengertian bahwa BPS perlu bukti, maka responden berkenan rumahnya di foto, tetapi hanya ingin diambil foto yang bersangkutan (responden), khususnya bagian toilet. Pada saat itulah HP jatuh (atau dijatuhkan?) ke toilet. HP milik PPL rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi dan yang menyedihkan adalah responden marah-marah,

memarahi PPL, sampai PPL menghentikan pendataan. Kejadian ini sudah dilaporkan ke Koseka dari BPS Kota Surakarta.

Kasus penolakan juga terjadi di Wilayah Mojo Semanggi, terdapat satu keluarga yang menolak pendataan oleh petugas Regsosek. Kedatangan PPL ditolak, begitu juga pendamping lapangan (PML) pun ditolak. Oleh karena itu, Koseka datang membantu dan menyampaikan bahwa penolakan adalah hak masyarakat, tetapi masyarakat yang menolak diminta memberikan surat pernyataan, bahwa mereka menerima apabila mereka tidak termasuk ke dalam program bantuan sosial atau program pembangunan lainnya ketika pemerintah melaksanakannya.

Pendampingan dan sosialisasi sejauh ini sudah dilakukan secara masif, antara petugas lapangan, bersama perangkat desa atau tetangga (RT RW) agar kedatangan petugas BPS di lapangan (PPL) diterima di masyarakat. Namun, permasalahan tidak hanya terletak pada sosialisasi semata. Rupanya pemaknaan masyarakat menjadi salah satu kunci berhasil atau tidaknya pendataan tersebut. Sebagian masyarakat yang mendapat bantuan rupanya memiliki ketakutan terhadap graduasi. Sebaliknya, sebagian masyarakat merasa bosan dengan pendataan yang dilakukan terus menerus, tetapi jarang mendapatkan bantuan. Dua hal ini seolah berlawanan, tetapi pada prinsipnya pemaknaan pendataan di benak kedua kelompok masyarakat ini adalah sama-sama terkait bantuan.

Proses sosialisasi pada masa mendatang sebaiknya lebih menekankan terkait proyeksi penggunaan data berdasarkan irisan kebutuhan lintas *stakeholder*. Misalnya, bagaimana data kesehatan rumah tangga dapat menjadi acuan bagi BPJS untuk menyalurkan jaminan kesehatan, bagaimana bencana menyebabkan dinamika kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga diperlukan pendataan ulang, dsb. Hal-hal semacam ini seharusnya lebih ditekankan dalam proses sosialisasi, di samping intensitas dan frekuensi yang masif, tetap dibutuhkan penekanan terkait struktur pemahaman masyarakat sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala BPS “Konsepnya harus jelas!”.

H. Cerita Kehidupan Keluarga Fokus Data: Harapan terhadap Akses Dana Bantuan

Sudut Kampung Semanggi memperlihatkan goresan himbauan pemerintah pada sebuah dinding di samping Masjid yang bertuliskan “Ayo Ikut KB, Kampung KB Mrantasi RW 03 Semanggi”. Rupanya saat menyusuri gang sempit, banyak sekali anak-anak berlarian selepas pulang sekolah. Ada anak-anak yang sudah berganti baju santai dan hendak bermain di rumah teman sebayanya, ada pula yang masih berseragam sekolah sambil menikmati coklat. Keberadaan anak-anak tersebut menggambarkan bahwa angka kelahiran di kampung tersebut masih tinggi. Sepetak rumah kecil dengan jemuran baju yang menghiasi sepanjang jendela rumah warga. Sambil memijat kaki yang sedang diperban, seorang mbah dengan malu-malu menjawab pertanyaan demi pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas lapang Regsosek. Mbah itu bernama Siti Rokhani. Perempuan kelahiran 1968 itu kini mendiami rumah ukuran 5x5 meter dengan biaya sewa tiga juta rupiah per tahunnya. Beliau menempati rumah selama kurang dari satu tahun dan sebelumnya beliau dan suaminya tinggal di bantaran sungai Bengawan Solo.

Di balik daster dan jilbab hitam, Mbah Siti berusaha mengingat jawaban dari setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh petugas pendata. Rumahnya terdiri dari satu ruang tamu kecil yang langsung berhadapan dengan meja, TV dan meja makan. Satu-satunya kamar di rumah tersebut malah tidak dijadikan sebagai tempat tidur, melainkan sebagai tempat penyimpanan barang seperti kulkas, lemari, helm, dan barang lainnya. Maklum, dengan ukuran tersebut rumah itu tidak dapat diisi lebih banyak barang, walaupun dapat akan memakan tempat bagi penghuninya. Sebuah guling lusuh dan bantal yang tak berbalut kain tergeletak di ruang tamunya, ditemani dengan sapu lidi sebagai penengah kasur busa yang sangat tipis. Kasur itu ditempatinya bersama suaminya saat malam hari. Pagi harinya, sang suami bekerja mencari rongsokan dari jam tujuh pagi sampai jam tiga sore.

Awalnya hampir tidak ada libur untuk pekerja seperti Pak Sukadi, nama suami Mbah Siti yang tidak sengaja terbaca oleh saya

di kartu keluarganya. Di kartu keluarga, tercatat pekerjaan Pak Sukadi adalah karyawan swasta, padahal kenyataannya Pak Sukadi bekerja serabutan. Begitulah potret pencatatan jenis pekerjaan pada dokumen administrasi di Indonesia, apapun pekerjaannya biasanya akan tertulis sebagai karyawan swasta karena tolok ukurnya adalah bukan PNS dan bukan wirausaha. Kaki suaminya itu pernah dioperasi karena menjadi korban tabrak lari tiga tahun lalu, kini tumpuan kakinya tidak sekuat dulu lagi. Dalam seminggu, ia hanya bekerja 2-3 kali, dan ketika dirasa cukup, maka dia akan istirahat di rumah. Ketika sedang kambuh, kaki suaminya akan ngilu. Setiap kali hal itu terjadi, Mbah Siti akan membeli obat di apotek. Mbah Siti sendiri mengidap penyakit gula darah selama lebih dari enam tahun dan saat ini masih menggunakan suntik insulin setelah menjalani tiga kali operasi. Selain itu, dirinya mengaku sudah mulai lupa menaruh sesuatu.

Saat petugas PPL menanyakan, “Apakah Ibu memiliki emas lebih dari 10 gram?” Mbah Siti Sambil tertawa dan memegang kakinya, “*Emas nopo, ndak ada, pun entek-entekan niki*, kemarin baru jual elektronik.” Barang berharga yang menjadi tumpuan perekonomian setiap harinya adalah motor untuk mencari rongsokan di kampung-kampung dan ponsel milik Mbah Siti untuk mem-*posting* jualan masakan milik juragannya. Sejak kakinya dioperasi, Mbah Siti belum dapat bekerja lagi. Dalam sehari, pasangan lansia tersebut mengeluarkan uang untuk keperluan makan sekitar 30—40 ribu rupiah, sedangkan untuk membayar listrik per dua minggu sekali adalah Rp22.000,00.

Mbah Siti memperlihatkan ruangan sekitar 1x2 meter yang digunakan sebagai kamar mandi sekaligus tempat masak dalam satu pintu tanpa sekat. Kamar mandi tersebut tidak dilengkapi dengan WC sehingga jika malam-malam saat Mbah Siti ingin buang air besar dia harus cepat-cepat lari ke toilet umum dengan saluran IPAL komunal. Kira-kira lokasi toilet umum tersebut sekitar 50 meter dari rumahnya, berada di luar gang, belum lagi jika harus mengantri dengan yang lain. Mbah Siti terkadang buang air besar di tempat anaknya, yang terletak tidak jauh dari gang rumahnya.

Setiap bulannya, Mbah Siti membayar iuran Rp15.000,00 untuk keperluan air, sedangkan untuk menggunakan IPAL Komunal dia harus membayar Rp5000,00 per bulan. Jika ditotal, pengeluaran per bulan mereka sekitar Rp1.200.000,00. Rupanya, hampir setiap rumah di gang perkampungan yang ditempati Mbah Siti rata-rata tidak memiliki toilet sendiri. Keterbatasan ruang dan akses pembuangan saluran limbah, menjadi permasalahan di kampung padat penduduk seperti Semanggi sehingga mereka menggunakan toilet umum untuk keperluan mandi dan buang air besar.

Mbah Siti menceritakan bagaimana dia bertemu dengan suaminya saat mengikuti program transmigrasi di Riau bersama orang tuanya.

“Ketemu di transmigrasi dulu, bedol desa ibu saya sama bapak saya tuh ikut daftar, ke Riau, dulu saya masih kecil. Pulang ke sini bapak saya meninggal tahun 1984, waktu anak saya lahir. Ibu saya janda, akhirnya dipulangkan sama pemerintah, dulu kan anu, kalau janda *dipulangkan*. Saya yang tinggal sana dapat *bojo*, bapaknya anak-anak itu. Ibu saya langsung pulang, saya *ndak* ikut, saya di sana. Saya pulang tahun 1992, sepuluh tahun di sana, terus punya anak dua itu baru enam tahun, adiknya baru setahun pulang.” (Wawancara dengan Mbah Siti, November 2022)

Rupanya program transmigrasi itu belum dapat menyejahterakan keluarga lansia tersebut ketika harus kembali ke Solo. Ketika petugas pendata menanyakan, “Apakah sering dilakukan pendataan di rumah ini?” Satu kata yang terucap dari Mbah Siti adalah *mboten*. Ketika kami menanyakan terkait persepsi tentang pendataan, jawaban Mbah Siti, “Kalau ada bantuan ya alhamdulillah, kalau *ndak* ada ya di bawah kita kan masih ada. Kemarin barusan jual barang elektronik, perkakas-perkakas rumah tangga.” Dalam benak Mbah Siti, pendataan adalah dana bantuan. Kegiatan pendataan identik dengan proses untuk mendapatkan pencairan bantuan. Persepsi semacam ini hampir kami temui di setiap rumah tangga yang didata. Padahal, hampir di setiap sudut pos RW di Kota Solo memiliki saluran televisi yang secara otomatis tersambung dengan iklan layanan pemerintah, dimana

informasi tentang Regsosek sudah gencar disiarkan. Selain itu, jajaran pemerintah kota, kecamatan, kelurahan, bahkan sampai RT-RW sudah melakukan sosialisasi terkait proses pendataan Regsosek ini. Namun, persepsi masyarakat tentang simplifikasi makna pendataan dengan bantuan masih sering tumpang tindih.

Selain Mbah Siti, kisah Sutanto menambah gambaran kondisi masyarakat di Kampung Semanggi. Bapak Sutanto, seorang duda 57 tahun yang ditinggal mati istrinya dan saat ini bekerja sebagai Linmas Kelurahan Semanggi. Rumah beliau berukuran 4x7 meter dengan 5 penghuni dalam satu rumah. Penghuni rumah selain Bapak Sutanto dan anaknya, ialah seorang menantu dan seorang keponakan. Bapak Sutanto memasukkan nama keponakannya ke dalam kartu keluarganya agar dapat mendaftar atlet karena pada waktu itu tempat tinggal keponakannya berada di Sukoharjo. Saat wawancara, beliau memberikan dua kursi pendek kepada tamu untuk duduk, sementara beliau mengalah tidak menggunakan kursi. Sepintas, terlihat ada cincin akik yang melingkar di jari tangan kirinya, ditambah dengan jam tangan bercorak kuning. Saat menahan beban tubuhnya sambil jongkok, Bapak Sutanto memegang dinding pintu agar tidak terjatuh saat menjawab PPL mengisi kuesioner. Dia menjawab pertanyaan seperti sedang berteriak, maklum, pendengarannya sedikit terganggu.

Meskipun secara ukuran rumah Bapak Sutanto sedikit lebih besar dari rumah Mbah Siti, tetapi rumah tersebut sama-sama memiliki satu kamar. Hanya anak gadisnya yang menempati kamar dan selebihnya tidur di ruang tamu. "*Yo wes di sini mbak, ber lima gek gedhi-gedhi,*" ungkap beliau. Kalimat Bapak Sutanto jika diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia 'Ya di sini Mbak tidurnya, berlima, mana kami ini besar-besar semua badannya'. Kondisi seperti ini tidak hanya dialami oleh Bapak Sutanto dan keluarganya saja, banyak rumah tangga yang penghuninya lebih dari lima orang dalam satu atap, dan rumah-rumah tersebut belum memiliki fasilitas sanitasi yang layak. Air dari pencucian di dapur rumah Pak Sutanto langsung mengalir ke pipa samping rumahnya sehingga baunya tercium dari gang depan rumahnya. Hampir sama seperti rumah Mbah Siti, kondisi dapur

berada sangat dekat dengan kamar mandi dan tidak ada ventilasi yang cukup.

Keberadaan anggota keluarga yang cukup banyak membuat durasi pengisian kuesioner jadi lebih panjang. PPL bernama Bayu secara berulang menanyakan pertanyaan yang sama untuk mempertanggungjawabkan inkonsistensi data yang diperoleh. Langkah tersebut merupakan strategi Bayu ketika mewawancarai rumah tangga dengan penghuni yang banyak karena terkadang informan yang didata mengalami kerancuan data saat menyampaikan informasi yang bukan tentang dia personal. Dari kelima anggota di kartu keluarga, hanya Risa yang menempuh kuliah, sedangkan lainnya berpendidikan SMP. Adapun anak laki-lakinya menempuh kejar paket C untuk melamar menjadi Linmas dan petugas kebersihan di Pasar Ayam Mojosoongo.

Salah satu anak Bapak Sutanto yang bernama Ryan memiliki usaha jual beli bibit anggur dan beberapa buah-buahan. Menurut penuturan sang bapak, usaha anaknya itu sudah mulai merambah ke Youtube untuk promosi, tetapi pembeli kadang ingin melihat langsung ke lokasi. Rupanya, saluran teknologi informasi menjadi alternatif di tengah keterputusan sekolah para pemuda di Kampung Semanggi. Selain itu, Ryan dan bapaknya juga memanfaatkan relasi di kantor kelurahan dalam memasarkan produknya. Untuk menjalankan usaha tersebut, dia rela mengontrak satu rumah untuk budidaya bibit bersama dengan adiknya. Rumah tersebut hanya digunakan untuk usaha, meskipun omzet per bulannya kurang lebih sekitar lima juta rupiah, mereka tetap memilih untuk tidur di rumah Pak Sutanto.

Kondisi rumah dengan kapasitas berlebih ternyata tidak hanya dialami oleh keluarga Bapak Sutanto. Jemuran baju yang menghiasi sepanjang gang sempit dan didominasi oleh popok dan baju anak-anak. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kelahiran baru sedang terjadi di perkampungan tersebut. Gambaran anak yang sudah berkeluarga tetapi masih tinggal dengan orang tuanya banyak ditemui di Kampung Semanggi. Jumlah anggota keluarga makin bertambah, tetapi mereka tetap berada di rumah orang tuanya. Alasannya beragam, entah karena

uang simpanan yang tersedia sedang digunakan untuk mencoba usaha mikro seperti mas Ryan, atau karena menyesuaikan dengan lokasi kerja yang berada di dekat rumah orang tua.

Kampung Semanggi saat ini, mungkin sedang berbenah dari stigma kumuh yang dilekatkan dari masa ke masa. Namun, masalah kepadatan penduduk dan roda perekonomian di pinggiran kota menyebabkan mereka terjebak di lingkaran setan kehidupan yang mengharuskan mereka untuk tetap berdekatan dengan anggota keluarga satu sama lain. Kondisi Mbah Siti dan Bapak Sutanto yang berusaha hidup berdekatan dengan anak cucunya menunjukkan bahwa keluarga memberikan rasa nyaman dan aman di tengah situasi ketidakpastian.

Ketidakpastian yang dihadapi keluarga ini baik dalam aspek ekonomi maupun ketidakpastian menempati rumah di tanah milik PT KAI yang sewaktu-waktu dapat diminta berpindah. Di lokasi permukiman ini, anak yang telah berkeluarga masih berada satu atap dengan orang tuanya. Perkara ini bukan hanya karena anak merupakan jaminan sosial bagi orang tuanya, melainkan karena mereka merasa lebih lengkap ketika berada berdekatan di tengah ketidakpastian.

I. Penutup

Proses pendataan Regsosek menjadi momentum untuk melihat bagaimana wajah dinamika demografi di Kota Surakarta. Kedekatan relasi pusat-daerah tergambar dari berjalannya proyek-proyek pembangunan fisik dan pemukiman sampai pada wilayah pinggiran seperti Kampung Semanggi dan Kampung Harmoni. Kemudahan penyaluran bantuan dan akses masyarakat terhadap berbagai layanan jaminan kesejahteraan sosial, kesehatan, dan pendidikan menjadi salah satu indikator kelancaran proses pendataan di kota paling padat penduduk di Jawa Tengah. Pemerintah Kota Solo melakukan sosialisasi secara masif melalui berbagai saluran, salah satunya yaitu

iklan layanan masyarakat yang terhubung langsung dengan setiap TV di pos RT/RW se-Kota Surakarta.

Di sisi lain, rupanya masih terjadi simplifikasi pemahaman di kalangan masyarakat bahwa pendataan adalah bagian dari penyaluran bantuan. Hal ini juga menjadi tantangan proses pendataan ke depannya karena fungsi pendataan tidak hanya sebagai proses penyaluran bantuan. Oleh karena itu, terjadi beberapa kasus penolakan warga terkait pendataan karena khawatir bantuan yang mereka terima akan dicabut. Proses sosialisasi diharapkan tidak hanya berjalan secara masif, tetapi juga dapat menysasar struktur pengetahuan masyarakat dalam memahami apa itu data dan proses pendataan. Artinya, tumpuan keberhasilan sosialisasi bukan hanya pada intensitas frekuensi, tetapi lebih pada penyamaan struktur pengetahuan terkait pendataan.

Tantangan lainnya adalah terkait kepadatan penduduk yang terjadi di Kota Surakarta. Kota tersebut memang sudah berbenah secara fisik, tetapi kepadatan penduduk terus meningkat baik karena angka kelahiran maupun urbanisasi harus diantisipasi sesegera mungkin. Banyaknya layanan dan bantuan berbagai program dari Pemerintah Kota Surakarta secara laten berpotensi memicu faktor penarik urbanisasi ke dalam kota tersebut. Sebaliknya, kepadatan penduduk yang tidak diimbangi dengan perbaikan struktur sosial dan ekonomi akan menimbulkan melubernya penduduk ke arah pinggiran kota. Dalam hal pendataan, jumlah penghuni yang banyak dalam satu rumah akan mempengaruhi alokasi waktu yang lebih panjang dalam mengisi kuesioner pertanyaan.

Beberapa keluarga baru sengaja masih menetap di rumah orang tua mereka sehingga dalam satu rumah di Kampung Semanggi maupun Kampung Harmoni terdapat lebih dari satu keluarga inti. Rupanya, kondisi ketidakpastian ekonomi mendorong mereka untuk berkelompok sehingga tidak jarang kami temui satu rumah dihuni oleh sekitar lebih dari lima orang. Kepadatan penduduk yang mengakar sampai pada masalah kultural semacam ini berdampak pada rantai ekosistem secara lebih luas, seperti permasalahan sampah

rumah tangga, akses sanitasi dan air bersih yang layak, dan kelayakan kondisi rumah tinggal.

Pendataan Regsosek diharapkan mampu menjadi tumpuan data terpadu yang dapat secara fleksibel dan terbuka diakses oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk keperluan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas. Data tersebut diharapkan dapat menjadi acuan tunggal perangkian urgensi dari berbagai langkah penanganan terhadap permasalahan sosial yang ada baik di tingkat lokal maupun nasional.

Daftar Pustaka

- Basundoro, P. (2022). *Merebut ruang kota: aksi rakyat miskin kota Surabaya 1900-1960an*. Marjin Kiri.
- BPS. (2020). Mencatat Indonesia [Salindia]. Diakses pada 5 November 2022 dari <https://www.bps.go.id/sp2020/faq/detail/117>
- BPS. (2022). Registrasi sosial ekonomi (Regsosek). Diakses pada 1 November 2022 dari <https://www.bps.go.id/Regsosek/>
- BPS Kota Surakarta. (2020). Hasil sensus 2020. BPS Kota Surakarta.
- BPS Kota Surakarta. (2021). Monografi kota Surakarta. BPS Kota Surakarta.
- Chandra, S. (2019). Glimpses of Indonesia's 1965 massacre through the lens of the census: The role of trucks and roads in "crushing" the PKI in East Java. *Indonesia*, 108(1), 1-21. doi:10.1353/ind.2019.0010
- Curtis, B. (2016). Foucault on governmentality and opulation: The impossible discovery. *Canadian Journal of Sociology*, 27(4), 505-533. doi:10.2307/3341588
- Ever, H. D., & Korff, R. (2002). *Urbanisme di Asia Tenggara: Makna dan kekuasaan dalam ruang-ruang sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Google. (t.t.). [Lokasi Kota Surakarta]. Diakses pada 5 Desember, 2022, dari <https://goo.gl/maps/t5i2evQxskzurxw6>.

- Heuken, A., & Pamungkas, G. (2021). *Menteng 'kota taman' pertama di Indonesia*. Cipta Loka Caraka.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2022, Oktober 11). Percepat Pencapaian Pembangunan, Regsosek Upaya Kementerian PPN/Bappenas Kembalikan Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Data. Diakses pada 6 November, 2022 dari <https://www.bappenas.go.id/berita/percepat-pencapaian-pembangunan-Regsosek-upaya-kementerian-ppnbappenas-kembalikan-perencanaan-dan-penganggaran-berbasis-data-jBiN9>
- McKenzie, R. (1924). The ecological approach to the study of the human community. *American Journal of Sociology*, 30(3), 287–301. doi:10.1086/213698
- Padawangi, R. (2019). Forced evictions, spatial (un) certainties and the making of exemplary centres in Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, 60(1), 65–79. doi:10.1111/apv.12213
- Padmiati, E. (2013). Menuju masyarakat berketahanan sosial melalui pemberdayaan lembaga sosial lokal di provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 12(3), 263–275.
- Republik Indonesia. (1997). Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. BPS.
- Ricklefs, M. C. (2008). *Sejarah Indonesia modern 1200-2008*. Serambi Ilmu Semesta.
- Setyaningrum, A., D. R., & Marfai, M. A. (2017). Kerentanan sosial terhadap banjir di bantaran sungai Bengawan Solo paska relokasi mandiri. *Majalah Ilmiah Globë*, 19(2), 105–112. doi:10.24895/mig.2017.19-2.467
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. PT Alfabet
- TNP2K. (2022). Basis data terpadu. TNP2K.
- Tukiran, T. (2016). Sensus penduduk di Indonesia. *Populasi*, 11(1), 17–34. doi:10.22146/jp.12328
- Walikota Surakarta. (2011). Rencana tata ruang wilayah kota Surakarta 2011–2031. Pemkot Surakarta.

Wertheim, W. F., & Giap, T. S. (1962). Social change in Java, 1900-1930. *Pacific Affairs*, 35(3), 223-247. doi:10.2307/2753184